



LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2024

#2023
#RKP THRIVE

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PSDKP
STASIUN PSDKP AMBON
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Pelaksanaan kegiatan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) Tahun 2024 ini telah diwarnai oleh sejumlah keberhasilan yang dicerminkan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran sesuai target. Informasi kinerja disajikan dalam Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Tahun 2024 Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon. LKj Stasiun PSDKP Ambon Triwulan II Tahun 2024 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi yang dibebankan kepada Stasiun PSDKP Ambon pada tahun 2020-2024. Laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Harapan kami, Laporan kinerja Triwulan II Tahun 2024 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja bagi seluruh staf UPT Stasiun PSDKP Ambon dan semua pihak yang terkait.

Ambon, 19 Juli 2024
Kepala Stasiun PSDKP Ambon



Martin Yerbias Luhulima, S.H., M.Si
NIP. 19750317 200212 1 004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) UPT Stasiun PSDKP Ambon Triwulan II Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen. PSDKP Tahun 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan 2024 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja tahun 2024. Penyusunan LKj pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan.

Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, UPT Stasiun PSDKP Ambon telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2024 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya. Dalam perjanjian kinerja Stasiun PSDKP Ambon terdiri dari Sasaran Kegiatan UPT Stasiun PSDKP Ambon yang bermuara pada 25 Sasaran Kegiatan yaitu: ⁽¹⁾ Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif; ⁽²⁾ Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif; ⁽³⁾ Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya kelautan; ⁽⁴⁾ Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya perikanan; ⁽⁵⁾ Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan; ⁽⁶⁾ Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas; ⁽⁷⁾ Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas; dan ⁽⁸⁾ Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP . Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Kegiatan, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK). Pada Tahun 2024 terdapat 25 Indikator Kinerja pengawasan SDKP yang menjadi komitmen kinerja Stasiun PSDKP Ambon. Dari 25 Indikator Kinerja, pada TW II tercapai 14 Indikator Kinerja. Total Nilai Kinerja Organisasi Stasiun PSDKP Ambon adalah 108.67 % (kategori baik) dengan total 14 Indikator Kinerja telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dan 11 Indikator Kinerja yang belum tercapai dikarenakan ditargetkan pada TW III hingga TW IV.

Tabel 1.1 Capaian Indikator Kinerja Stasiun PSDKP Ambon Triwulan II Tahun 2024

Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target	Target	Capaian	%
				2024	JUNI	JUNI	
Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif						120	
Indeks kualitas pembinaanPokmaswas (indeks)	indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	81	50	100	120
Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif						104,66	
Indeks kinerja operasi kapal pengawas (Indeks)	indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	91	91	100	109,89
Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks)	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	91	91	94,46	103,8
Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	%	Maximize	Rata-rata	100	100	100	100
Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya kelautan						100	
Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)	Nilai	Maximize	Rata-rata	100	100	100	100
Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya perikanan						100	
Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (Nilai)	Nilai	Maximize	Rata-rata	100	100	100	100
Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan							
Persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	0		
Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%)	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	0		
Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas						120	
Indeks Pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80	60	100	120
Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80	50	80	120
Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas							
Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	93	0		
Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP						107,38	
Nilai minimal yang Diperisyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Stasiun PSDKP Ambon	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	75	0		
Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Ambon	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	94	94	125	120
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Ambon	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80	0		
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Ambon	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80	0		

Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target	Target	Capaian	%
				2024	JUNI	JUNI	
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Ambon	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	93,76	82	83,15	101,4
Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Ambon	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	82	0		
Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	100	100	100
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen PSDKP (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70	0		
Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Ambon	indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	82	77	79,27	102,95
Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Ambon	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	84	0		
Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Ambon yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80	80	80	100
Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	21	0		
Inovasi pelayanan publik yang diterapkan lingkup Stasiun PSDKP Ambon	inovasi	Maximize	Nilai Posisi Akhir	1	0		
Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik lingkup Stasiun PSDKP Ambon	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80	80	92,63	115,79

Tercapainya IKU dan IKM sesuai dengan target yang ditetapkan, tidak terlepas dari peran serta seluruh pegawai lingkup Stasiun PSDKP Ambon, baik itu pada Stasiun, Satuan Pengawasan, maupun juga Wilayah Kerja lingkup Stasiun PSDKP Ambon, serta Awak Kapal Pengawas yang saling mendukung dalam tercapainya target kegiatan pada Triwulan II Tahun 2024.

Melalui Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran Perencanaan pada Tahun 2024.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	1
1.3. Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan....	2
1.4. Tugas dan Fungsi Stasiun PSDKP Ambon.....	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis Ditjen. PSDKP2020–2024.....	7
2.2 Visi dan Misi Stasiun PSDKP Ambon	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN	
3.1. Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Ambon	12
3.2. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Stasiun PSDKP Ambon	
1. IKU 1.1 Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas.....	14
2. IKU 2.1 Indeks Kinerja operasi Kapal Pengawas	17
3. IKU 2.2 Indeks Kinerja operasi Speedboat Pengawas	19
4. IKU 2.3 Presentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas.....	21
5. IKU 3.1Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan.....	23
6. IKU 4.1Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	34
7. IKU 6.1 Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan.....	41
8. IKU 6.2 Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	42
9. IKU 8.2 Presentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Resiko Stasiun PSDKP Ambon.....	44
10. IKU 8.4 Indeks Profesionalitas ASN.....	46
11. Presentase Dokumen yang tindak lanjutnya telah dilengkapi.....	47
12. Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik.....	48
13. Presentase Unit Kerja yang manajemen pengetahuan yang terstandar	48
14. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).....	50
3.3. Akuntabilitas Keuangan.....	51
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	53
B. Saran	53
C. Rekomendasi	53

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Capaian Indikator Kinerja Stasiun PSDKP Ambon Triwulan II Tahun 2024	iii
Tabel 2.1 Pernjanjian Kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2024.....	10
Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) + Indikator Kinerja (IK) Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2024	13
Tabel 3.2 Capaian Sasaran Kegiatan 1.1 Terselenggaranya Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat yang Partisipatif.....	15
Tabel 3.3 Capaian Indeks Kualitas Pembinaan POKMASWAS.....	17
Tabel 3.4 Capaian Sasaran Kegiatan 2 "Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif"	18
Tabel 3.5 Capaian Kinerja IK 2.1 "Indeks Kualitas Kinerja Operasi Kapal Pengawas"	18
Tabel 3.6 Perhitungan Indeks kinerja Operasi Kapal Pengawas Triwulan II	19
Tabel 3.7 Capaian kinerja IKU 2.2 "Indeks kinerja Operasi Speedboat Pengawas"	20
Tabel 3.8 Perhitungan Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas.....	20
Tabel 3.9 Capaian IKU 2.3 "Presentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas"	22
Tabel 3.10 "Perhitungan Kinerja Logistik Kapal Pengawas"	23
Tabel 3.11 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3.1 "Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan"	25
Tabel 3.12 Hasil Pengawasan Unit Usaha dalam pengelolaan limbah	27
Tabel 3.13 Hasil Pengawasan Konservasi	29
Tabel 3.14 Hasil Pengawasan Ruang Laut.....	30
Tabel 3.15 Pengawasan Jenis Ikan Dilindungi.....	32
Tabel 3.16 Pengawasan WP3K	33
Tabel 3.17 Pengawasan Penangkapan Ikan yang merusak	34
Tabel 3.18 Capaian kinerja IKU 4.1 "Nilai Kualitas Penyelesaian pemeriksaan usaha perikanan"	36
Tabel 3.19 Hasil Pengawasan Budidaya.....	37
Tabel 3.20 Hasil Pengawasan Unit Pengolahan Ikan	39
Tabel 3.21 Hasil Pengawasan Kapal Perikanan	40
Tabel 3.22 "Capaian Kinerja IK. 6.1 Presentase Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan Dan Perikanan.....	42
Tabel 3.23 "Perhitungan Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan Dan Perikanan.....	42
Tabel 3.24 "Capaian Kinerja IK. 6.2 Presentase Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan SDKP.....	43
Tabel 3.25 "Perhitungan Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan SDKP	44
Tabel 3.26 "Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)"	45
Tabel 3.27 "Persentase Indeks Profesionalitas ASN"	47
Tabel 3.28 "Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Ambon yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan".....	48
Tabel 3.29 Capaian IK 8.9. "Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup Stasiun PSDKP Ambon"	49
Tabel 3.30 "Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang Terstandar lingkup Stasiun PSDKP Ambon	50
Tabel 3.31 Presentase Capaian IKPA Stasiun PSDKP Ambon.....	51
Tabel 3.32 Rincian penyerapan anggaran per kegiatan Stasiun Pengawasan SDKP Ambon pada Triwulan II Tahun 2024	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2024.....	5
Gambar 2. Peta Wilayah Kerja Stasiun PSDKP Ambon.....	5
Gambar 3. Capaian Sasaran Kegiatan Stasiun PSDKP Ambon TW II Tahun 2024.....	13
Gambar 4. Grafik Capaian kinerja Kualitas Pembinaan POKMASWAS Triwulan II lingkup UPT Ditjen PSDKP	16
Gambar 5. Capaian kinerja Indeks kinerja Operasi Kapal Pengawas lingkup UPT Ditjen PSDKP Triwulan II Tahun 2024	20
Gambar 6. Capaian kinerja “Indeks kinerja operasi speedboat pengawas” lingkup UPT Ditjen PSDKP	22
Gambar 7. Capaian kinerja “Indeks Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas lingkup UPT PSDKP”	24
Gambar 8. Capaian kinerja “Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha Kelautan	26
Gambar 9. Capaian kinerja persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan	36
Gambar 10. Capaian Kinerja “Penaan Sanksi Asministratif Bidang Kelautan dan Perikanan	43
Gambar 11. Capaian Kinerja “Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan SDKP”	44
Gambar 12. Capaian Kinerja “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)”	46
Gambar 13. Capaian IK “ Pelaksanaan Indeks Profesionalitas ASN”	47
Gambar 14. Capaian IK “ Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup UPT DITJEN PSDKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan”	48
Gambar 15. Capaian Kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Lingkup PSDKP Ambon	49
Gambar 16. Capaian Presentase Unit Kerja yang menerapkan system manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup UPT Ditjen PSDKP	50
Gambar 17. Capaian Nilai Indikator IKPA lingkup UPT Ditjen PSDKP.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut UPT PSDKP merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. UPT PSDKP Ambon merupakan UPT yang ditetapkan berdasarkan KEPMEN Nomor 33/PERMEN-KP/2016 pada tanggal 28 September 2016. Stasiun PSDKP Ambon membawahi 4 (Empat) Satuan Pengawas (Satwas), yaitu: Seram Bagian Timur, Halmahera Selatan, Ternate, dan Morotai.

Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Stasiun PSDKP Ambon sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara diwajibkan menetapkan target kinerja serta melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapainya. Pelaksanaan kegiatan pengawasan SDKP hanya dapat terselenggara dengan akuntabel/efektif dan efisien jika diterapkan pengelolaan kinerja organisasi yang baik. Untuk mewujudkan hal tersebut maka diperlukan manajemen kinerja yang di dalamnya meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengukuran dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan.

1.2 Maksud dan Tujuan

1) Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Ambon triwulanan Tahun 2024 adalah bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP selama satu tahun anggaran, kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

2) Tujuan

Tujuan penyusunan laporan kinerja triwulanan Tahun 2024 adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja UPT Stasiun PSDKP Ambon serta memperbaiki kinerja kearah yang lebih baik di masa yang akan datang, dimulai dari proses perencanaan yang benar, pelaksanaan dan evaluasinya. Berdasarkan pengukuran dan evaluasi yang dilakukan pada setiap triwulan, akan dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik lagi.

1.3 Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Isu aktual pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang menuntut perlunya dilakukan pengawasan terhadap pemanfaatan SDKP, antara lain :

1. Bidang Perikanan Tangkap

Masih maraknya kegiatan *illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI 714, 715 dan 716) baik yang dilakukan oleh kapal ikan indonesia (KII) maupun kapal ikan asing (KIA).

2. Bidang Perikanan Budidaya

- a. Limbah kegiatan budidaya ikan yang menyebabkan pencemaran kawasan pesisir dan laut
- b. Penggunaan Obat dan Pakan Ikan yang membahayakan lingkungan perairan.
- c. Pengangkutan ikan hidup yang tidak terkontrol dengan baik.
- d. Pemanfaatan izin budidaya tidak sesuai dalam pelaksanaannya.

3. Bidang Pengolahan Hasil Perikanan

Limbah yang dihasilkan dalam pengolahan ikan perikanan yang menyebabkan pencemaran perairan.

4. Bidang Pemasaran Hasil Perikanan

Ikan berformalin masih ditemui di pasar-pasar tradisional.

5. Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

- a. Kerusakan terumbu karang akibat penggunaan alat tangkap yang merusak habitat ikan, seperti bom dan racun;
- b. Kegiatan perikanan yang menyebabkan pencemaran perairan pesisir dan laut.

1.4 Tugas dan Fungsi Stasiun PSDKP Ambon

Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, UPT Stasiun PSDKP Ambon melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Stasiun PSDKP Ambon menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
- b. Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan; Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- d. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Stasiun PSDKP Ambon memiliki Sumber Daya Manusia yang berkompeten pada bidangnya, dengan total pegawai 66 Orang.

• Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi (TUSI) organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, maka dalam menjalankan tugasnya Kepala Stasiun membawahi Kepala Urusan Umum, Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional, dimana masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan seperti diuraikan dibawah ini :

1. Kepala Stasiun :

Merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial dibidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan dilingkungan Stasiun

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Kepala Urusan Umum:

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, kepegawaian, jabatan fungsional, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.

3. Ketua Tim Kerja Penanganan Pelanggaran:

Melakukan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas), serta evaluasi, dokumentasi, informasi dan pelaporan dibidang pengawasan dan penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan.

4. Ketua Tim Kerja Prasarana dan Operasi Kapal Pengawas:

Melakukan pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan, dan perencanaan dan pengembangan pengawakan kapal pengawas.

5. Ketua Tim Kerja Intelejen dan Pengawasan SDK

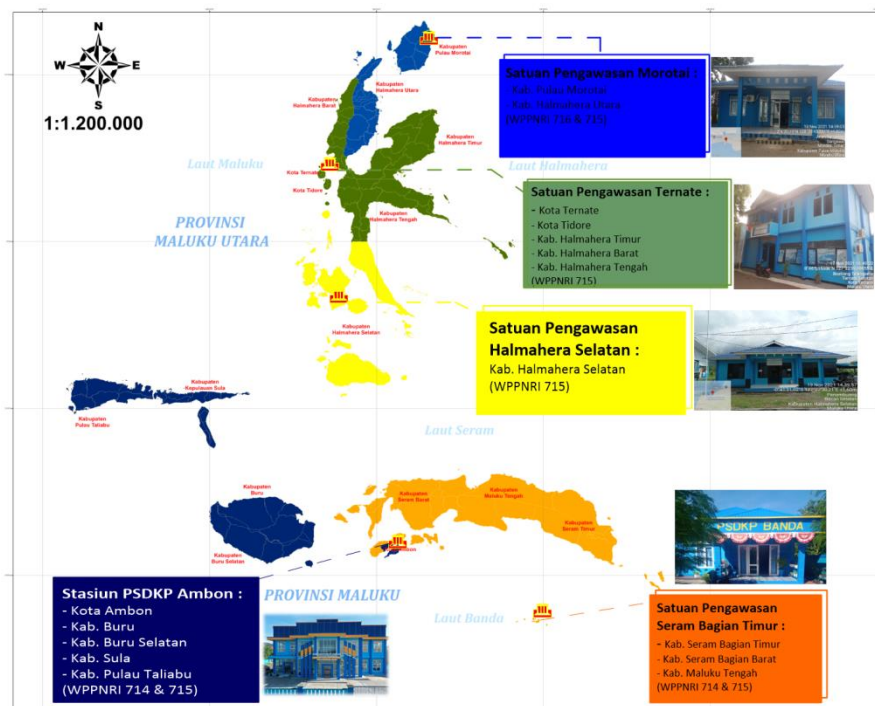
Melakukan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring operasional kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan serta kegiatan lain sesuai dengan tugas jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan untuk fungsional lainnya disesuaikan dengan bidang tugas fungsional yang diembannya berdasarkan SK fungsional yang telah ditetapkan.

6. Ketua Tim Kerja Intelejen dan Pengawasan SDP

Melakukan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring operasional kegiatan pengawasan sumberdaya perikanan serta kegiatan lain sesuai dengan tugas jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan untuk fungsional lainnya disesuaikan dengan bidang tugas fungsional yang diembannya berdasarkan SK fungsional yang telah ditetapkan.



Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2024



Gambar 2. Peta Wilayah Kerja Stasiun PSDKP Ambon

2 Sistematika Penyajian Laporan

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Ambon Triwulan II Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja dan keuangan Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2024.

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja ke depan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari : 1) Rencana strategis Ditjen. PSDKP Tahun 2020-2024; 2) Renstra Stasiun PSDKP Ambon tahun 2020-2024; 3) Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2024; dan 4) Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Ambon tahun 2024.

2.1 Rencana Strategis Ditjen. PSDKP 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan KKP 2020-2024.

Renstra Ditjen PSDKP ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan nomor : 23A/KEP-DJPSDKP/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024. Secara ringkas substansi Renstra Ditjen PSDKP diuraikan sebagai berikut :

2.2 Visi dan Misi Stasiun PSDKP Ambon

Dalam rangka memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja dan peranan Ditjen PSDKP serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Ditjen PSDKP, maka dirumuskan Visi yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan.

A. Visi

Visi Stasiun PSDKP Ambon 2020-2024 adalah “Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggungjawab menuju terwujudnya Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan”

B. Misi

Untuk mewujudkan Visi Ditjen PSDKP Ambon Tahun 2020-2024, maka ditetapkan misi Ditjen PSDKP yakni :

1. Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi;
2. Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan;
3. Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggungjawab; dan
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup Ditjen PSDKP.

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Ditjen PSDKP, maka disusunlah Visi misi Stasiun PSDKP Ambon tahun 2020-2024 : “Perairan Indonesia bebas dari *Illegal, Unreported and Unregulated* (IUU) Fishing dan kegiatan yang merusak Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab di wilayah kerja Stasiun PSDKP Ambon untuk mendukung Visi Direktorat Jenderal PSDKP”. Untuk itu misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya Stasiun PSDKP Ambon dalam mewujudkan visi Stasiun PSDKP Ambon yakni :

- 1) Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi pada lingkup wilayah kerja UPT Stasiun PSDKP Ambon;
- 2) Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan pada lingkup wilayah kerja UPT Stasiun PSDKP Ambon;
- 3) Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggung jawab pada lingkup wilayah kerja UPT Stasiun PSDKP Ambon; dan
- 4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup wilayah kerja UPT Stasiun PSDKP Ambon.

C. Tujuan

Sebagai penjabaran dari Visi Stasiun PSDKP Ambon maka dirumuskan beberapa Tujuan Stasiun PSDKP Ambon tahun 2020-2024 yang terkait dengan dan didukung oleh pelaksanaan tugas dan fungsi Stasiun PSDKP Ambon, yaitu:

1. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan melalui meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan pada lingkup wilayah kerja UPT Stasiun PSDKP Ambon;
2. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional melalui meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan pada lingkup wilayah kerja UPT Stasiun PSDKP Ambon;
3. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui optimalnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dari kegiatan yang merusak lingkup wilayah kerja UPT Stasiun PSDKP Ambon; dan
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik pada lingkup wilayah kerja UPT Stasiun PSDKP Ambon.

D. Sasaran Kegiatan

Berdasarkan Tujuan Stasiun PSDKP Ambon tahun 2020-2024 tersebut maka disusunlan Sasaran Kegiatan tahun 2020-2024 yang dirumuskan dari Sasaran Strategis Ditjen PSDKP tahun 2020-2024. Sasaran Kegiatan Stasiun PSDKP tahun 2020-2024 adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Stasiun PSDKP Ambon pada tahun 2020-2024 yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa kegiatan yang berupa Sasaran kegiatan. Berikut Sasaran Kegiatan Stasiun PSDKP Ambon tahun 2020-2024 :

1. Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan;
2. Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan;
3. Terselenggaranya Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat;
4. Terselenggaranya Pemantauan Operasi Armada PSDKP;

5. Terselenggaranya Pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP;
6. Terselenggaranya Penangananan Pelanggaran di bidang Kelautan dan Perikanan; dan
7. Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Stasiun PSDKP Ambon

E. Perjanjian Kinerja tahun 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: 1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; 2) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; 3) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Stasiun PSDKP Ambon memiliki Perjanjian Kinerja tahun 2024 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya.

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2024

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
SK.1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	IK.1.1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (Indeks)	81
SK. 2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	IK.2.1	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (Indeks)	91
		IK.2.2	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (Indeks)	91
		IK.2.3	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100%
SK. 3	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	IK.3.1	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)	100
SK. 4	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	IK.4.1	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (Nilai)	100

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
SK. 5	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	IK.5.1	Persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	100%
		IK.5.2	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%)	100%
SK. 6	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas	IK.6.1	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)	80
		IK.6.2	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	80
SK. 7	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas	IK.7.1	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	93
SK. 8	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	IK.8.1	Nilai minimal yang Diperyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Stasiun PSDKP Ambon	75
		IK.8.2	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)	100
		IK.8.3	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen. PSDKP (nilai)	70
		IK.8.4	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Ambon	82
		IK.8.5	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun PSDKP Ambon	84
		IK.8.6	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Ambon yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	80%
		IK.8.7	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	21
		IK.8.8	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan lingkup Stasiun PSDKP Ambon (Inovasi)	1
		IK.8.9	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik lingkup Stasiun PSDKP Ambon	80

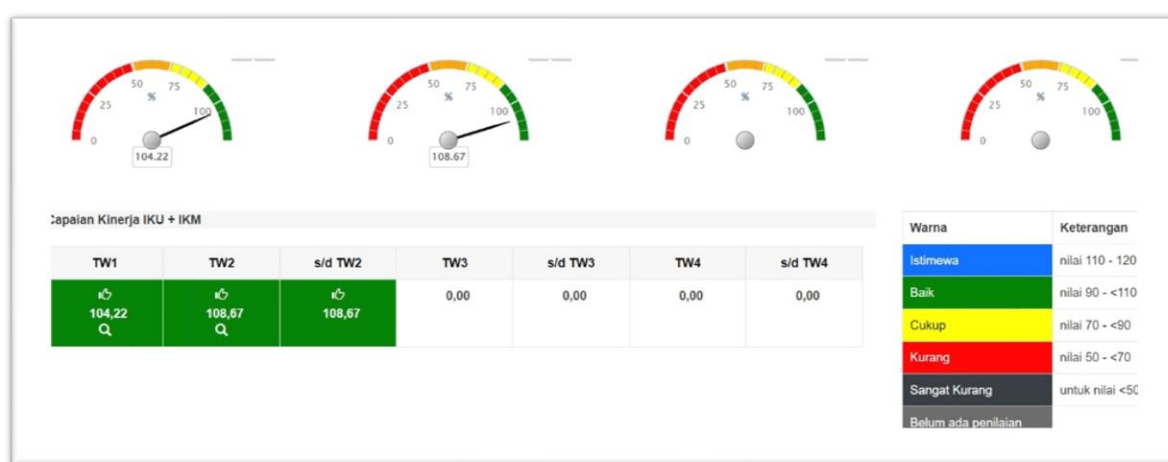
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
		IK.8.10	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Ambon	94%
		IK.8.11	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Ambon	80%
		IK.8.12	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Ambon	80%
		IK.8.13	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Ambon	93,76
		IK.8.14	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Ambon	82

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual IKU. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja triwulanan yang didukung dengan aplikasi kinerjaku.kkp.go.id dan merupakan aplikasi berbasis informasi teknologi.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Ambon

Berdasarkan implementasi dalam pengelolaan kinerja pada Triwulan II Tahun 2024, Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Ambon meliputi 6 Sasaran Kegiatan dengan 14 Indikator Kinerja. Nilai Kinerja Stasiun PSDKP Ambon Sebesar 108.67 % dengan kategori hijau (baik) pada Sasaran Kegiatan TW II (Gambar 3).



Sumber : SAPK (Kinerjaku.kkp.go.id)

Gambar 3. Capaian Sasaran Kegiatan Stasiun PSDKP Ambon Triwulan II Tahun 2024

Capaian Kinerja diperoleh dari akumulasi penghitungan capaian seluruh Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi kontrak kerja antara Kepala Stasiun PSDKP Ambon dengan Direktur Jenderal PSDKP. Adapun Nilai setiap Sasaran Kegiatan merupakan hasil perhitungan IKU dan IKM yang menjadi parameter tercapainya Sasaran Kegiatan. Capaian masing-masing Sasaran kegiatan serta IKU dan IKM dapat dilihat pada 13table berikut :

Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) + Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2024

Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target	Target	Capaian	%
				2024	JUNI	JUNI	
Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif						120	
Indeks kualitas pembinaanPokmaswas (indeks)	indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	81	50	100	120
Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif						104,66	

Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target	Target	Capaian	%
				2024	JUNI	JUNI	
Indeks kinerja operasi kapal pengawas (Indeks)	indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	91	91	100	109,89
Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks)	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	91	91	94,46	103,8
Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	%	Maximize	Rata-rata	100	100	100	100
Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya kelautan						100	
Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)	Nilai	Maximize	Rata-rata	100	100	100	100
Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya perikanan						100	
Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (Nilai)	Nilai	Maximize	Rata-rata	100	100	100	100
Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan							
Persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	0		
Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%)	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	0		
Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas						120	
Indeks Pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80	60	100	120
Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80	50	80	120
Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas							
Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	93	0		
Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP						107,38	
Nilai minimal yang Diperyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Stasiun PSDKP Ambon	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	75	0		
Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Ambon	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	94	94	125	120
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Ambon	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80	0		
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Ambon	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80	0		
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Ambon	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	93,76	82	83,15	101,4
Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Ambon	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	82	0		

Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target	Target	Capaian	%
				2024	JUNI	JUNI	
Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	100	100	100
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen PSDKP (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70	0		
Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Ambon	indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	82	77	79,27	102,95
Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Ambon	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	84	0		
Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Ambon yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80	80	80	100
Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	21	0		
Inovasi pelayanan publik yang diterapkan lingkup Stasiun PSDKP Ambon	inovasi	Maximize	Nilai Posisi Akhir	1	0		
Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik lingkup Stasiun PSDKP Ambon	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80	80	92,63	115,79

Sumber : <https://kinerjaku.kkp.go.id>

3.2 Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Stasiun PSDKP Ambon

Pada Triwulan II Tahun 2024, Stasiun PSDKP Ambon telah melakukan tugas dan fungsinya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Analisis pencapaian kinerja Stasiun PSDKP Ambon pada Triwulan II Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

- Sasaran Kegiatan 1 “Terselenggaranya Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat yang Partisipatif”**

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1.1 yaitu “Terselenggaranya system pengawasan berbasis masyarakat” diuraikan dalam 1 IKU yaitu “*Indeks kualitas pembinaan pokmaswas*” adapun capaian Indikator Kinerja pada Sasaran kegiatan 1.1 sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Sasaran Kegiatan 1.1 “Terselenggaranya Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat yang Partisipatif”

Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Perhitungan	Target	Target	Capaian	%
			2024	JUNI	JUNI	
Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif					120	
Indeks kualitas pembinaanPokmaswas (indeks)	indeks	Nilai Posisi Akhir	81	50	100	120

1. IKU 1.1 “Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas ”

Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) merupakan Sistem Pengawasan SDKP berbasis Masyarakat (SIMSWASMAS). Indeks kualitas pembinaan POKMASWAS digunakan untuk menentukan kualitas pelaksanaan pembinaan POKMASWAS oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). Pembinaan POKMASWAS adalah kegiatan pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, konsultasi, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan, yang dilakukan melalui pembekalan, sosialisasi dan/atau bimbingan teknis kepada anggota POKMASWAS guna meningkatkan pengetahuan dan partisipasi aktif POKMASWAS dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Indikator kinerja ini ditargetkan pencapaiannya pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 50% dan telah terealisasi 100%. Kegiatan pembinaan POKMASWAS dituangkan dalam sebuah laporan hasil pembinaan POKMASWAS. Komponen penilaian kegiatan pembinaan POKMASWAS antara lain:

- a. Rencana kerja kegiatan pembinaan;
- b. Pendataan keaktifan POKMASWAS;
- c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan.

Hasil capaian Indikator Kinerja Triwulan II Tahun 2024 diperoleh dari hasil penilaian beberapa kegiatan utama yang dilaksanakan yaitu : Sosialisasi Pembinaan Pokmaswas oleh Stasiun PSDKP Ambon dan Komisi IV DPR RI sebagai mitra dari Kementerian Kelautan dan Perikanan di Desa Pohea Kec.Sanana Utara Kab. Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara. Kegiatan Sosialisasi Penguatan Peran Masyarakat SDKP Melalui Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat Tahun 2024 dihadiri oleh Anggota masyarakat POKMASWAS serta instansi terkait seperti Tenaga Ahli Ibu Alien Mus, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, Kepala Babinsa Kec. Sanana Utara, Perwakilan dari POLAIRUD Kec. Sanana Utara, Perwakilan dari Pos TNI AL Kec. Sanana Utara Kepala Desa di Kecamatan Sanana Utara, Kepala Kecamatan Sanana Utara. Sosialisasi tersebut membahas tentang illegal fishing dan destructive fishing yang marak terjadi di Kepulauan Sula.

Tabel 3.3. Capaian Indeks Kualitas Pembinaan POKMASWAS

Nilai Indeks Kualitas Pembinaan POKMASWAS

NO	Kegiatan	(a)	(b)	(c)
1	Pembinaan POKMASWAS di Desa Pohea Kec. Sanana Utara Bersama Ibu Alien Mus SH	√	√	√

Formula :
$$x = \frac{a + b + c}{100}$$

Keterangan :

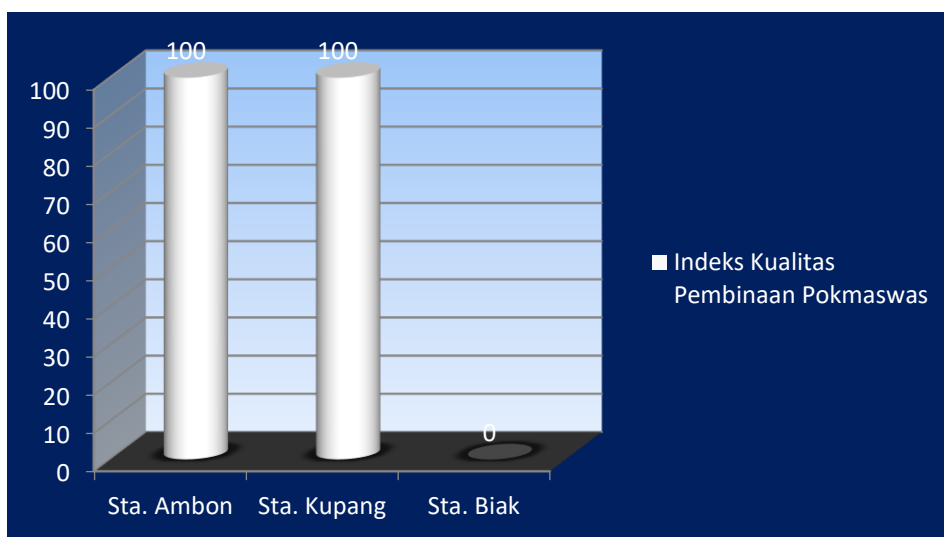
X : Indeks Kualitas Supervisi Pembinaan POKMASWAS (%)

a : Rencana Kerja Kegiatan Pembinaan (20)

b : Pendataan Keaktifan POKMASWAS (bobot : 30)

c : Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan (bobot : 50)

Jika nilai capaian Stasiun PSDKP Ambon disandingkan dengan capaian UPT PSDKP lainnya maka dapat dilihat bahwa Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas Stasiun PSDKP Ambon dan Stasiun PSDKP Kupang yaitu sebesar 100.



Gambar 4. Grafik Capaian Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas UPT PSDKP Triwulan II Tahun 2024

- Sasaran Kegiatan 2 “Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif”**

Pencapaian Sasaran Kegiatan 2.1 yaitu “Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif” diuraikan dalam 3 IKU yaitu (1) “*Indeks kinerja operasi kapal pengawas*”; (2) “*Indeks kinerja operasi speedboat pengawas*” dan (3) “*Presentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas*” adapun capaian Indikator Kinerja pada Sasaran kegiatan 2.1 sebagai berikut :

Tabel 3.4 Capaian Sasaran Kegiatan 2 "Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif"

Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Perhitungan	Target 2024	Target JUNI	Capaian JUNI	%
Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif					104,66	
Indeks kinerja operasi kapal pengawas (Indeks)	indeks	Nilai Posisi Akhir	91	91	100	109,89
Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks)	Indeks	Nilai Posisi Akhir	91	91	94,46	103,8
Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	%	Rata-rata	100	100	100	100

2. IKU 2.1 "Indeks kinerja operasi kapal pengawas

Indeks Kinerja adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional kapal pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

- Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan Kelautan;
- Cakupan wilayah pengawasan;
- Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR; dan
- Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.

Pada triwulan II Tahun 2024 capaian Indikator Kinerja Utama 2.1 "Indeks kinerja operasi kapal pengawas" telah terealisasi sebesar 100 dari target 91 atau 109.89% (Tabel 3.3).

Tabel 3.5 Capaian Kinerja IK 2.1 "Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas"

Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Perhitungan	Target 2024	Target JUNI	Capaian JUNI	%
Indeks kinerja operasi kapal pengawas (Indeks)	indeks	Nilai Posisi Akhir	91	91	100	109,89

IKU ini ditargetkan pada Triwulan I-II tahun 2024 namun dikarenakan sumber anggaran BBM Kapal Pengawas dari PNBP masih diblokir sehingga tetap terealisasi sebesar 100 dari target 91.

Pencapaian IKU ini berdasarkan hasil perhitungan kinerja kapal pengawas HIU 13 dengan variabel pembentuk :

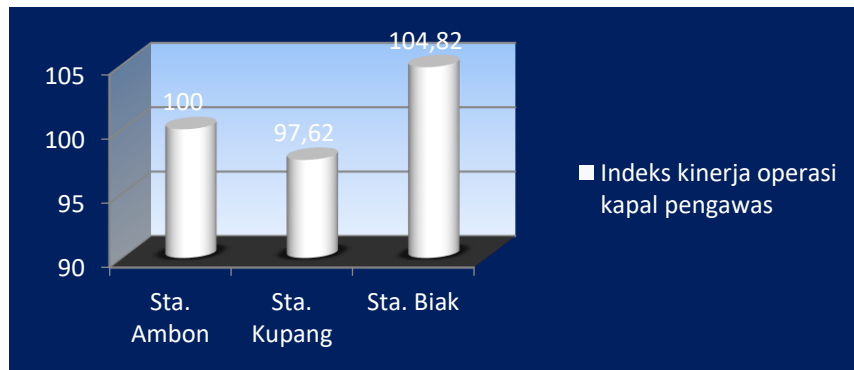
1. Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (40%) : Nilai 40
2. Cakupan Wilayah Pengawasan (40%): Nilai 40
3. Tindak Lanjut Target Operasi (15%): Nilai 15
4. Hasil Dukungan Operasi Lainnya (5%) : Nilai 5

Adapun hasil perhitungan nilai Indeks kinerja kapal pengawas pada triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6 Perhitungan Indeks Kinerja Kapal Pengawas Triwulan II

Pemeriksaan Kapal Perikanan (70%)	TW II	Target	20
		Realisasi	20
		Nilai	70,00
Pemeriksaan Kelautan (30%)	TW II	Target	2
		Realisasi	2
		Nilai	30
Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (40%)	TW II	Nilai	40
Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (40%)	TW II	Target	0,32
		Realisasi	0,32
		Nilai	40
Intercept Indikasi Pelanggaran (60%)	TW II	Target	0
		Realisasi	0
		Nilai	60
Dukungan Kegiatan SAR (40%)	TW II	Target	0
		Realisasi	0
		Nilai	40
Tindak Lanjut Target Operasi (15%)	TW II	Nilai	15
Penyitaan Alat Tangkap Terlarang (30%)	TW II	Target	0
		Realisasi	0
		Nilai	30
Pemutusan Rumpon Ilegal (30%)	TW II	Target	0
		Realisasi	0
		Nilai	30
Dukungan Operasi Bersama (40%)	TW II	Target	0
		Realisasi	0
		Nilai	40
Dukungan Operasi Lainnya (5%)	TW II	Nilai	5
Total Nilai Indeks TW II			100,00
Nilai per Satker			100,00

Jika nilai capaian Stasiun PSDKP Ambon disandingkan dengan capaian UPT PSDKP lainnya maka dapat dilihat bahwa UPT lingkup Ditjen PSDKP telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan (Gambar 4).



Gambar 5. Capaian kinerja “Indeks kinerja operasi kapal pengawas” lingkup UPT Ditjen PSDKP Triwulan II Tahun 2024

3. IKU 2.2 “Indeks kinerja operasi speedboat pengawas”

Indeks Kinerja adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional Speed Boat Pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

1. Pemeriksaan yang terdiri dari Pemeriksaan Kapal Perikanan dan Pemeriksaan Kelautan;
2. Cakupan wilayah pengawasan;
3. Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR;
4. Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.

Pada Triwulan II Tahun 2024 capaian Indikator Kinerja Utama 3 “Indeks kinerja operasi speedboat pengawas” telah terealisasi sebesar 94.07 dari target 94.46 atau 103.8% (Tabel 3.5).

Tabel 3.7 Capaian IK 2.2 “Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas”

Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Perhitungan	Target 2024	Target JUNI	Capaian JUNI	%
Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks)	Indeks	Nilai Posisi Akhir	91	91	94,46	103,8

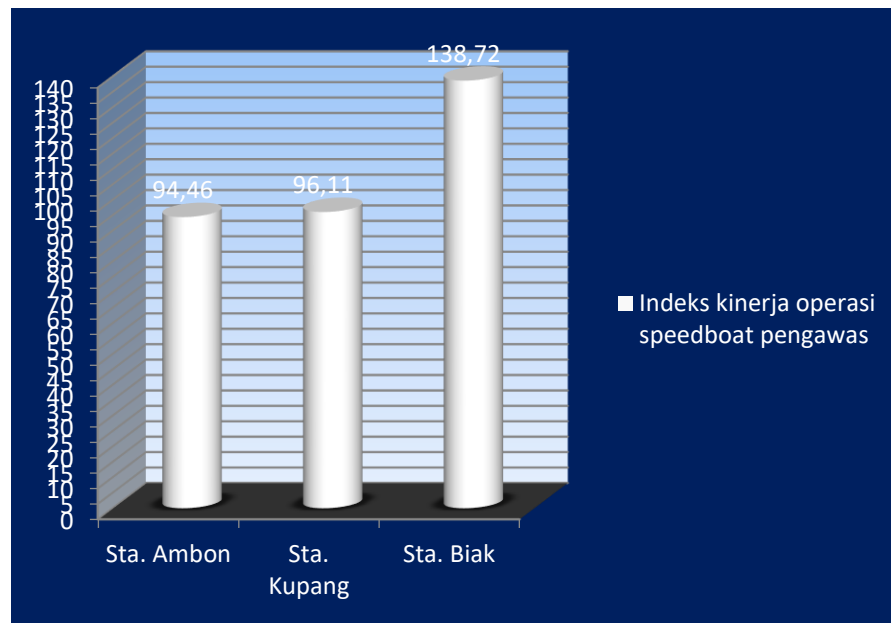
IKU ini ditargetkan pada Triwulan II tahun 2024 sebesar 91 dan terealisasi sebesar 94,46 atau 103,8 % sehingga menjadi tolak ukur untuk dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan capaian pada triwulan/tahun selanjutnya. Capaian IKU ini tidak terlepas dari peran operator speedboat, pengawas perikanan lingkup Stasiun PSDKP Ambon yang bekerja keras dalam mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian IKU ini berdasarkan hasil perhitungan 4 unit speedboat pengawas lingkup Stasiun PSDKP Ambon :

Tabel 3.8 Perhitungan Indeks kinerja operasi speedboat pengawas

Nama Speedboat			Napoleon 40	Napoleon 51	Napoleon 55	Tenggiri
Pemeriksaan Kapal Perikanan (50%)	TW II	Target	9	10	13	6
		Realisasi	5	6	12	3
		Nilai	27,778	30	46,1538	40,625
Pemeriksaan Kelautan (50%)	TW II	Target	0	10	0	0
		Realisasi	0	31	0	0
		Nilai	50	50	50	50
Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (40%)	TW II	Nilai	31,11	32,00	38,46	36,25
Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (40%)	TW II	Target	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006
		Realisasi	6,4298	6,2224	0,000000015183	0,00019725
		Nilai	40	40	40	40
Intercept Indikasi Pelanggaran (60%)	TW II	Target	0	0	0	0
		Realisasi	0	0	0	0
		Nilai	60	60	60	60
Dukungan Kegiatan SAR (40%)	TW II	Target	0	0	0	0
		Realisasi	0	0	0	0
		Nilai	40	40	40	40
Tindak Lanjut Target Operasi (15%)	TW II	Nilai	15	15	15	15
Penyitaan Alat Tangkap Terlarang (40%)	TW II	Target	0	0	0	0
		Realisasi	0	0	0	0
		Nilai	40	40	40	40
Pemutusan Rumpon Ilegal (40%)	TW II	Target	0	0	0	0
		Realisasi	0	0	0	0
		Nilai	40	40	40	40
Dukungan Operasi Bersama (20%)	TW II	Target	0	0	0	0
		Realisasi	0	0	0	0
		Nilai	20	20	20	20
Dukungan Operasi Lainnya (5%)	TW II	Nilai	5	5	5	5
Total Nilai Indeks			91,11	92,00	96,46	96,25
Nilai per Satker			94,46			

Berdasarkan hasil perhitungan variabel pembentuk dalam perhitungan indkes kinerja speedboat pengawas lingkup Stasiun PSDKP Ambon, tak terlepas dari capaian gelar operasi yang dilaksanakan oleh 4 unit speedboat pengawas lingkup Stasiun PSDKP Ambon dengan jumlah hari operasi **18 HO** dengan total kapal yang diperiksa adalah 36 KII. Pada triwulan I tahun 2024 ini, 1 unit speedboat pengawas belum secara maksimal operasi, dikarenakan speedboat tersebut (Napoleon 040) dalam keadaan tidak siap operasi terkendala oleh mesin rusak. Namun dapat dimaksimalkan capaian oleh 3 unit speedboat lainnya (Napoleon 051, 055 dan tenggiri) dalam melaksanakan gelar operasi.

Jika nilai capaian Stasiun PSDKP Ambon disandingkan dengan capaian UPT PSDKP lainnya maka dapat dilihat bahwa nilai indeks kinerja UPT Stasiun PSDKP lainnya telah tercapai sesuai dengan target yag ditetapkan (Gambar 5).



Gambar 6. Capaian kinerja “Indeks kinerja operasi speedboat pengawas” UPT Ditjen PSDKP

4. IKU 2.3 “Persentase pemenuhan logistik Kapal Pengawas”

Pemenuhan logistik merupakan komponen utama dalam mendukung operasional Kapal Pengawas dalam melakukan operasi pengawasan SDKP. Tanpa adanya logistik BBM, Makanan, dan logistik lainnya tentu operasi kapal pengawas tidak dapat dilaksanakan. Pemenuhan logistik ini tidak dapat dilepaskan dengan Rencana Operasi Kapal Pengawas. Rencana Operasi erat kaitannya dengan TARGET OPERASI.

Target operasi sangat dipengaruhi oleh waktu untuk melaksanakan operasi dimaksud. Maka, peran ketersediaan logistik sangat besar. Dalam proses pemenuhan

logistik dimaksud, sangat dipengaruhi oleh pihak lain secara dominan dalam hal ini PT Pertamina Patra Niaga terkait ketersediaan dan ketepatan waktu pengangkutan BBM dan adanya antrian kapal pada saat pengisian BBM. Target Presentase pemenuhan logistik kapal pengawasan pada Triwulan II adalah 100 dan tercapai sebesar 100 atau terealisasi sebesar 100%.

Tabel 3.9. Capaian IKU 2.3 “Persentase pemenuhan logistik Kapal Pengawas”

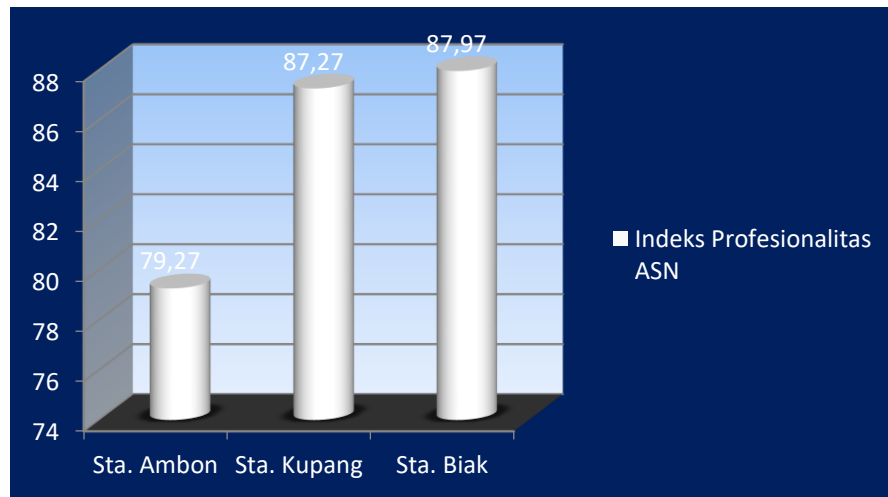
Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Perhitungan	Target 2024	Target JUNI	Capaian JUNI	%
Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	%	Rata-rata	100	100	100	100

Capaian IKU ini tidak terlepas dari peran Awak Kapal Pengawas serta pegawai pada tim kerja Sarana dan Prasarana lingkup Stasiun PSDKP Ambon yang bekerja keras dalam mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian IKU ini berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan logistik merupakan komponen utama dalam mendukung operasional Kapal Pengawas dalam melakukan operasi pengawasan SDKP (Tabel 3.9)

Tabel 3.10 Perhitungan Indeks kinerja pemenuhan logistik Kapal Pengawas

Kriteria Penilaian	Jumlah Indeks Kinerja	Indeks Pemenuhan	Faktor Penghitung	Maksimal Indeks	Target Nilai TW II	Realisasi Nilai TW II	Rumus TW II
1. Bahan Bakar Minyak (BBM) (30%); Pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak untuk kebutuhan Operasi Pengawasan SDKP (bulanan) Perhitungan: (3/3) x 30%	3	3	30%	100	30	30	A/B x 1 TW x C x D
2. Pelumas (20%); Pemenuhan kebutuhan Pelumas untuk kebutuhan permesin Kapal Pengawas dalam menunjang pengawasan SDKP (triwulan) Perhitungan: (1/1) x 20%	1	1	20%	100	20	20	A/B x 1 TW x C x D
3. Bahan Makanan (30%); Pemenuhan kebutuhan bahan makanan bagi awak kapal Pengawas (bulanan) Perhitungan: (3/3) x 25%	3	3	25%	100	25	25	A/B x 1 TW x C x D
4. Air Tawar (15%); Pemenuhan kebutuhan air tawar untuk keperluan sehari - hari AKP di atas kapal (bulanan) Perhitungan : (3/3) x 15%	3	3	15%	100	15	15	A/B x 1 TW x C x D
5. Alat – Alat Pelayanan (5%) Pemenuhan kebutuhan alat – alat pelayanan guna menunjang kegiatan operasional kapal (triwulan) Perhitungan: (1/1) x 5%	1	1	5%	100	5	5	A/B x 1 TW x C x D
6. Senjata Api (5%) Pemenuhan Kebutuhan Senjata Api Periode Triwulan Perhitungan : (1/1) x 5%	1	1	5%	100	5	5	A/B x 1 TW x C x D
TARGET					100	100	

Jika nilai capaian indeks pemenuhan logistik kapal pengawas Stasiun PSDKP Ambon disandingkan dengan capaian UPT PSDKP lainnya maka dapat dilihat bahwa UPT PSDKP lainnya (Kupang dan Biak) telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dengan nilai capaian presentase sebesar 100% (Gambar 3.5).



Gambar 7. Capaian kinerja “Indeks kinerja pemenuhan logistik Kapal Pengawas” lingkup UPT Ditjen PSDKP

- **Sasaran Kegiatan 3. “Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya kelautan”**

Pencapaian Sasaran Kegiatan 3 yaitu *“Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan”* diuraikan dalam 1 IKU yaitu (1) *“Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan”* adapun capaian Indikator Kinerja pada Sasaran kegiatan 3 sebagai berikut :

5. IKU 3.1 “Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan”

Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha bidang kelautan adalah upaya pengawasan usaha kelautan oleh Pengawas Perikanan dan/atau Polsus PWP3K dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha kelautan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaporan hasil pengawasan. Pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan meliputi pelaku usaha pemanfaatan ruang laut (yang memiliki KKPR), pelaku usaha yang tidak menimbulkan pencemaran, pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi, pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi, pelaku usaha pemanfaatan pesisir (reklamasi) dan pelaku usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil, pelaku usaha yang memiliki kapal perikanan dibawah 10 GT yang tidak terindikasi melakukan DF (tidak membawa bom, bius, setrum, serta ikan hasil DF). Pada triwulan II tahun 2024 capaian IKU 5 *“Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan”* adalah 100 dari yang ditargetkan 100 atau 100% .

Tabel 3.11 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3.1 “Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan”

Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Perhitungan	Target	Target	Capaian	%
			2024	JUNI	JUNI	
Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya kelautan					100	
Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)	Nilai	Rata-rata	100	100	100	100

IKU ini jika dibandingkan dengan capaian pada Triwulan I dapat dilihat bahwa Stasiun PSDKP Ambon mampu mempertahankan capaian kinerja. Ukuran keberhasilan IKU tersebut diperoleh dari 6 komponen kegiatan pengawasan sumber daya kelautan yakni :

- a) Unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya;
- b) Unit usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya;
- c) Unit usaha pemanfaatan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya;
- d) Unit usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks CITES yang diperiksa kepatuhannya;
- e) Unit usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diperiksa kepatuhannya; dan
- f) Unit Usaha Perikanan yang diawasi dari Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak.

Seluruh pencapaian IKU ini tak terlepas dari polsus WP3K dan pengawas perikanan Stasiun PSDKP Ambon yang bersinergi bersama instansi terkait seperti Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Maluku dan Maluku Utara, Loka PSPL Sorong Satker Ternate dan Ambon, Polair, TNI AL yang turut andil bersama-sama menertibkan peraturan perundang-undangan bagi para pelaku usaha yang bergerak dibidang kelautan dalam hal ini memberikan dampak langsung terhadap sumber daya kelautan dan perikanan. Dalam pelaksanaan kegiatan IKU ini juga tidak dipungkiri mendapatkan banyak tantangan dilapangan yakni jarak tempuh ke lokasi yang sebagian besar merupakan daerah kepulauan.

Jika nilai capaian Stasiun PSDKP Ambon disandingkan dengan capaian UPT PSDKP lainnya maka dapat dilihat bahwa seluruh Eselon IV lingkup Ditjen PSDKP telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan (Gambar 6).



Gambar 8. Capaian kinerja “Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan” lingkup UPT Ditjen PSDKP

❖ 6 Kegiatan pembentuk IKU Pengawasan Sumber Daya Kelautan

1. Unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya

Pengawasan utama yang dilakukan adalah pengawasan pencemaran perairan akibat kegiatan perikanan dan non perikanan yakni meliputi pemeriksaan dokumen perizinan, sarana dan prasarana, serta instalasi pengolahan air limbah. Parameter pengukuran terdiri dari :

- Memiliki dokumen pencegahan pencemaran (persetujuan lingkungan/AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lainnya);
- Memiliki IPAL/Alat pencegahan pencemaran;
- Kesesuaian pelaksanaan pencegahan pencemaran dengan dokumen pencegahan pencemaran (IPAL/Alat pencegahan pencemaran terpasang dan beroperasi).

Tahun 2024 pengawasan unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya telah diperiksa sebanyak 19 Pelaku Usaha. Pada Triwulan II dilakukan pemeriksaan pencemaran perairan detil kegiatannya ada pada Tabel 3.8.

Tabel 3.12 Hasil Pengawasan Unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah

No.	Tanggal Pengawasan	Pelaku Usaha	Alamat	Titik Koordinat
1	13 Maret 2024	PT. Aneka Sumber Tata Bahari	Jl.Hurnala 2 Negeri Tulehu, Kec. Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku	3°34'53.976" LS - 128°19'35.040" BT
2	14 Maret 2024	PT. Maluku Prima Makmur (MPM)	Jl. Dr. J.Leimena No.8A, Desa/Kelurahan Tawiri, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku	3°69'03.57" LS - 128°11'21.97" BT
3	14 Maret 2024	PT. Maluku Prima Sukses	Jl. Trans, Negeri Ureng, Kec. Leihitu, Kab. Maluku Tengah	3°66'64.48" LS - 127°95'11.44" BT
4	18 Maret 2024	PT. Peduli Laut Maluku	In. Raya Tulehu, Dusun Mamokeng, Negeri Tulehu	3°58'73.67" LS - 128°33'04.08" BT
5	20 Maret 2024	PT. Harta Samudera	Komplek Pelabuhan Perikanan Nusantara Tantui RT.001/01 Sirimau Kota Ambon, Prov. Maluku	-3°67'73.04" S - 128°18'88.88" E
6	21 Maret 2024	PT. Mina Maluku Sejahtera	PPI Eri, Dusun Eri RT 007/002 Negeri Nusaniwe Kec. Nusaniwe Kota Ambon Prov. Maluku	-3°76'18.36" S - 128°12'48.12" E
7	22 Maret 2024	PT. Perikanan Indonesia	Jln. Kapten Piere Tandean Desa/Kelurahan Galala, Kec. Sirimau Kota Ambon Prov. Maluku	3°39'50.88" S - 128°12'4.90" E
8	22 Maret 2024	PT. Kreasi Himono Indonesia	PPI Eri, Dusun Eri RT 007/002 Negeri Nusaniwe Kec. Nusaniwe Kota Ambon Prov. Maluku	03°45'42.30" S - 128°07'27.84" E
9	15 Mei 2024	CV. Advani Bintang Samudra	Jln. Sultan Hasanuddin, Desa Pandan Kasturi, 'Komplek Pelabuhan Perikanan Nusantara Kec. Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku	3°40'33.15"S, 128°11'21.16"E
10	15 Mei 2024	PT. Intimas Surya	Jln. Sultan Hasanuddin, Desa Pandan Kasturi, 'Komplek Pelabuhan Perikanan Nusantara Kec. Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku	3°6'76.65" LS - 128°1'89.72" E
11	15 Mei 2024	CV. Maluku Fortuna	Jln. Sultan Hasanuddin, Desa Pandan Kasturi, 'Komplek Pelabuhan Perikanan Nusantara Kec. Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku	3°40'33.29"S, 128°11'21.88"E
12	17 Mei 2024	PT. Tri Satria Samudra	Jln. Sultan Hasanuddin, Desa Pandan Kasturi, 'Komplek Pelabuhan Perikanan Nusantara Kec. Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku	3°6763143" LS - 128°1891518" E
13	17 Mei 2024	CV. Harta Laut Cemerlang	Jln. Sultan Hasanuddin, Desa Pandan Kasturi, 'Komplek Pelabuhan Perikanan Nusantara Kec. Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku	3°40'32.51" S - 128°11'20.76" E
14	17 Mei 2024	PT. Asmin Jumahir Sejahtera	Jln. Sultan Hasanuddin, Desa Pandan Kasturi, 'Komplek Pelabuhan Perikanan Nusantara Kec. Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku	3°40'36.08" S - 128°11'23.24" E
15	20 Mei 2024	PT. Mina Usaha Harapan	Jln. Sultan Hasanuddin, Desa Pandan Kasturi, 'Komplek Pelabuhan Perikanan Nusantara Kec. Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku	3°40'33.9888" LS - 128°11'23.1756" BT

16	20 Mei 2024	Firma Sanu	Jln. Sultan Hasanuddin, Desa Pandan Kasturi, 'Komplek Pelabuhan Perikanan Nusantara Kec. Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku	3°40'37.51" LS - 128°11'21.71" BT
17	27 Mei - 02 Juni 2024	PT. Harta Samudera	Desa Daeo, Kec. Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara	2.062919 LS - 128.488707 BT
18	27 Mei - 02 Juni 2024	PT. Morotai Marine Culture	Pulau Ngele Ngele, Kec. Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara	2.203210 LS - 128.212497 BT
19	27 Mei - 02 Juni 2024	CV. Markindo Raya	Desa Pale, Kec. Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara	'1.669385 LS - 127.994121 BT

2. Unit usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya

Pengawasan kawasan konservasi yang dilakukan oleh Stasiun PSDKP Ambon ditargetkan pada Kawasan Konservasi Nasional TWP Laut Banda. Dalam melakukan kegiatan pengawasan kawasan konservasi perairan target pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melakukan kegiatan kelautan dan perikanan di kawasan konservasi nasional TWP Laut banda. Adapun kegiatan tersebut terdiri dari :

- penangkapan ikan
- penangkapan ikan oleh nelayan yang bermukim di sekitar kawasan konservasi
- pembudidayaan ikan
- penelitian
- pendidikan
- kegiatan pariwisata alam perairan
- pelayaran kapal penumpang wisata/kapal pesiar
- penyediaan infrastruktur pariwisata alam perairan
- pendirian dan/atau penempatan bangunan laut
- penempatan instalasi di laut
- pemanfaatan air laut selain energi
- pembuatan foto, film dan video komersial
- landing, take off, dan taxiing seaplane

Parameter verifikasi pelaku usaha pada kawasan konservasi yakni:

- Memiliki dokumen perizinan (TDUP/TDKP/ NIB/Surat izin usaha pemanfaatan kawasan konservasi untuk pengusahaan pariwisata alam perairan/Surat izin

usaha pemanfaatan kawasan konservasi untuk kegiatan lain di kawasan konservasi yang bersifat menetap /SIUP/dokumen lainnya)

- Kesesuaian zonasi kegiatan pelaku usaha di dalam kawasan konservasi perairan. Pada Triwulan II telah dilakukan pengawasan kawasan konservasi perairan sejumlah 17 Pelaku Usaha.

Tabel 3.13. Hasil Pengawasan Konservasi

No	Tanggal Pengawasan	Nama Kawasan Konservasi	Nama Pelaku Usaha	Aktivitas	Dokumen Perizinan	Zona
1	29 - 30 Januari 2024	Taman Wisata Perairan Laut Banda	Japri Djali	Penangkapan Ikan	No. TDKP : 45.21.8197.77.00099	Zona Pemanfaatan
			Herdin La Raru	Penangkapan Ikan	Masih dalam proses penerbitan izin Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Maluku	Zona Pemanfaatan
			Elvis Rahayaan	Penangkapan Ikan	Masih dalam proses penerbitan izin Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.Maluku	Zona Pemanfaatan
2	22 - 23 Februari 2024	Taman Wisata Perairan Laut Banda	Anto	Penangkapan Ikan	-	Zona Pemanfaatan
			Alfaris	Penangkapan Ikan	-	Zona Pemanfaatan
			Bukhori	Penangkapan Ikan	-	Zona Pemanfaatan
			Iwan	Penangkapan Ikan	Masih dalam proses penerbitan izin Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.Maluku	Zona Pemanfaatan
3	25 - 26 Maret 2024	Taman Wisata Perairan Laut Banda	Aswan	Penangkapan Ikan	-	Zona Pemanfaatan
			Marwan	Penangkapan Ikan	-	Zona Pemanfaatan
			Jafri Jali	Penangkapan Ikan	45.21.8197.77.0.0099	Zona Pemanfaatan
			Mustafa	Penangkapan Ikan	Masih dalam proses penerbitan izin Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.Maluku	Zona Pemanfaatan
			Elfis Rahayaan	Penangkapan Ikan	Masih dalam proses penerbitan izin Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.Maluku	Zona Pemanfaatan
			Fata Maidi	Penangkapan Ikan	0127/TDKP/GP.VI/V/2021	Zona Pemanfaatan
			Rakiman Basiman	Penangkapan Ikan	0147/TDKP/GP.VI/V/2021	Zona Pemanfaatan
			Mustakim Saiman	Penangkapan Ikan	0029/TDKP/GP.VI/V/2021	Zona Pemanfaatan
4	15 Mei 2024	Taman Wisata Perairan Laut Banda	Rusdi Laucen	Penangkapan Ikan	B81000946	Zona Pemanfaatan
			Ruslan	Penangkapan Ikan	-	Zona Pemanfaatan

3. Unit usaha pemanfaatan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya

Pada Triwulan II tahun 2024 target pengawasan unit usaha pemanfaatan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya oleh Stasiun PSDKP Ambon adalah 17 pelaku usaha. Parameter pemeriksaan yakni :

- Memiliki dokumen KKPRL
- Kesesuaian jenis usaha dengan dokumen perizinan

Pada Triwulan II telah dilakukan pemeriksaan terhadap 17 pelaku usaha. Adapun hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Tabel 3.14 Hasil Pengawasan Ruang Laut

No	Tanggal Pelaksanaan	Pelaku Usaha	Izin KKPRL	NO. KBLI	Titik Koordinat	Luas
1	20 -24 Februari 2024	PT. Kusu Island Resort	11082310518200000	KBLI 56101 - Restoran	0°27'30.69"S - 127°42'36.14"E	7,8 Ha
2		PT. Proco Island Bambu Resort	7042210218204010	KBLI 55110 - Hotel Bintang	0°24'20.01"S - 127°43'22.64"E	5.500 M ²
3		PT. International Nabucco Resort	-	-	0°27'10.77"S -127°42'7.72"E	-
4		PT. Sali Bay Resort	2082310518200020	KBLI 55110 - Hotel Bintang	0°25'44.94"S - 127°44'26.31"E	0,3 Ha
5	25 -29 Februari 2024	PT. Nusa Karya Arindo	14072310518200000	KBLI 07295 - Pertambangan Bijih Nikel	0°88'95.36" S - 128°29'82.22" E	48,82 Ha
6		PT. Sumberdaya Arindo	14072310518200000	KBLI 07295 - Pertambangan Bijih Nikel	0°83'72.21" S - 128°26'19.68" E	30 Ha
7		PT. Antam UBPN Maluku Utara	14072310518200000	KBLI 07295 - Pertambangan Bijih Nikel	0°87'36.84" S - 128°28'54.20" E, 0°78'71.11" S - 128°32'44.29" E	46,09 Ha
8		PT. Feni Halmahera Timur	14072310518200000	KBLI 52221 - Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut	0°83'71.55" S - 128°25'01.35" E	36,95 Ha
9	1-3 April 2024	PT. Sambaki Tambang Sentosa	0220003693608		0°54'34.362"N - 128°20'42.540" E	± 0,9 Ha
10		PT. Alam Raya Abadi	8120110251277		0°7'25.36"N - 128°4'32.55" E	± 0,54 Ha
11	6 - 10 Mei 2024	PT. Wanatiara Persada	8120200812791		1°29'18.498"S - 127°23'21.243" E	12,95 Ha
12		PT. Rimba Kurnia Alam	8120200812791		1°28'10.771"S - 127°25'45.753" E	3 Ha

13	26 - 29 Mei 2024	PT. Trimegah Bangun Persada Tbk	9120003410228	KBLI 68130	1°32'2.717"S - 127°24'29.07" E	1. 24.47 Ha 2. 15.91 Ha 3. 167.4 Ha 4. 240.22 Ha 5. 11.96 Ha 6. 9.63 Ha 7. 131.2 Ha 8. 13.03 Ha 9. 18.26 Ha 10. 100 Ha
14	27 Mei - 02 Juni 2024	PT. Morotai Marine Culture	8120104922208	KBLI 03215	2°12'10.56"S - 128°12'44.13" E	11.65 Ha
15		PT. Natural Indococonut Organik	9120102681301		1.622639 S - 127.989421 E	14 Ha
16		PT. Harta Asia Pasifik	9120408801745		2°0'58.99"S - 128°16'53.77" E	708 Ha
17	19 Juni 2024	Mangrove Dewa Cafe and Resto	-		3°65'72.23"S - 128°21'43.40" E	0.046 Ha

4. Unit usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks CITES yang diperiksa kepatuhannya

Pada Triwulan II Tahun 2024 target pengawasan unit usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks CITES yang diperiksa kepatuhannya yakni sebanyak 3 pelaku usaha. Parameter verifikasi pelaku usaha terdiri dari :

- Memiliki dokumen perizinan (SIPJI/ SAJI)
- Memiliki kuota penangkapan dan ekspor untuk kegiatan penangkapan/ pengambilan dan perdagangan luar negeri
- Kesesuaian pelaksanaan usaha dengan izin yang dimiliki
- Kesesuaian jenis ikan

Pada triwulan II tahun 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 3 pelaku usaha yaitu CV Rumatiga Empat Saudara, UD Aprilia Samudra dan UD Alinaa yang dilaksanakan oleh Pengawasan Perikanan Stasiun PSDKP Ambon. Adapun hasil pengawasan sebagai berikut :

Tabel 3.15 Pengawasan Jenis Ikan Dilindungi

NO	TANGGAL PELAKSANAAN	PELAKU USAHA	SIPJI	SAJI	KBLI	ALAMAT LOKASI	JENIS IKAN
1	19 Januari 2024	CV. Rumatiga Empat Saudara	174/I/KKP/2021	00250/DN/LPSPL.1/I/2024	KBLI : 46206 - Perdagangan Besar Hasil Perikanan	Jl. Jenderal Sudirman, Desa Batu Merah, Kec. Sirimau Kota Ambon, Provinsi Maluku	1. Hiu Lanjaman, Merak Bulu, Hiu Karang Sirip Hitam, Hiu Kejen, Lanjaman, Merak Bulu, Hiu Kerba, Hiu Buas, Hiu Bujit, Hiu Karet, Hiu Mangiwang, Hiu Lanjaman Karang, Hiu Sonteng
2	22 - 26 April 2024	UD. Aprillia Samudra	40/1/KKP/2021	00053/SAJI/DN/LPSPL.1/I/2024; 00290/SAJI/DN/LPSPL.1/II/2024	1. KBLI : 46206 - Perdagangan Besar Hasil Perikanan 2. KBLI : 03151- Penangkapan/pengambilan ikan bersirip (Pisces) yang dilindungi dan/ atau termasuk dalam Appendiks CITES	Jl. Syahril - Geser, Desa Geser, Kec. Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku	Hiu Sutra
3		UD. Alinaa	34/1/KKP/2021	00469/SAJI/DN/LPSPL.1/II/2024; 00812/SAJI/DN/LPSPL.1/IV/2024	1. KBLI : 47245 - Perdagangan Eceran daging dan ikan olahan 2. KBLI : 03151- Penangkapan/pengambilan ikan bersirip (Pisces) yang dilindungi dan/ atau termasuk dalam Appendiks CITES	Negeri Administratif sesar, Desa Sesar, Kec. Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku	Hiu Sutra

5. Unit usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diperiksa kepatuhannya

Pada Triwulan II Tahun 2024 pengawasan unit usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diperiksa kepatuhannya sebanyak 13 pelaku usaha pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil fokus pada kegiatan reklamasi maupun pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya dengan status Penanaman Modal Asing (PMA) dan/atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Pemanfaatan oleh PMA dan/atau PMDN meliputi kegiatan sebagai berikut:

- Pariwisata
- Budidaya Laut
- Usaha perikanan dan kelautan
- Industri perikanan secara lestari
- Pertanian

- Peternakan
- Usaha lainnya sesuai peraturan perundang-undangan

Parameter verifikasi pelaku usaha:

- Memiliki dokumen perizinan (NIB/Rekomendasi pemanfaatan PPK di bawah 100 km2/Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau kecil dan perairan Disekitarnya dalam Rangka Penanaman Modal Asing/dokumen lainnya)
- Kesesuaian jenis usaha dengan dokumen perizinan
- Kesesuaian luasan dan titik koordinat dengan dokumen perizinan

Pada triwulan I tahun 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap unit usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diperiksa kepatuhannya sebanyak 4 Pelaku Usaha.

Tabel 3.16 Pengawasan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

No	Tanggal Pelaksanaan	Pelaku Usaha	Izin KKPR	NO. KBLI	Titik Koordinat	Luas
1	25 -29 Februari 2024	PT. Nusa Karya Arindo	1407230000000000	KBLI 07295 - Pertambangan Bijih Nikel	0°88'95.36" S - 128°29'82.22" E	48,82 Ha
2		PT. Sumberdaya Arindo	1407230000000000	KBLI 07295 - Pertambangan Bijih Nikel	0°83'72.21" S - 128°26'19.68" E	30 Ha
3		PT. Antam UBPN Maluku Utara	1407230000000000	KBLI 07295 - Pertambangan Bijih Nikel	0°87'36.84" S - 128°28'54.20" E, 0°78'71.11" S - 128°32'44.29" E	46,09 Ha
4		PT. Feni Halmahera Timur	1407230000000000	KBLI 52221 - Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut	0°83'71.55" S - 128°25'01.35" E	36,95 Ha
5	1-3 April 2024	PT. Sambaki Tambang Sentosa	0220003693608		0°54'34.362"N - 128°20'42.540" E	± 0,9 Ha
6		PT. Alam Raya Abadi	8120110251277		0°7'25.36"N - 128°4'32.55" E	± 0,54 Ha
7	6 - 10 Mei 2024	PT. Wanatiara Persada	8120200812791		1°29'18.498"S - 127°23'21.243" E	12,95 Ha
8		PT. Rimba Kurnia Alam	8120200812791		1°28'10.771"S - 127°25'45.753" E	3 Ha
9	26 - 29 Mei 2024	PT. Trimegah Bangun Persada Tbk	9120003410228	KBLI 68130	1°32'2.717"S - 127°24'29.07" E	1. 24.47 Ha 2. 15.91 Ha 3. 167.4 Ha 4. 240.22 Ha 5. 11.96 Ha 6. 9.63 Ha 7. 131.2 Ha 8. 13.03 Ha 9. 18.26 Ha 10. 100 Ha
10	27 Mei - 02 Juni 2024	PT. Morotai Marine Culture	8120104922208	KBLI 03215	2°12'10.56"S - 128°12'44.13" E	11.65 Ha
11		PT. Natural Indococonut Organik	9120102681301		1.622639 S - 127.989421 E	14 Ha
12		PT. Harta Asia Pasifik	9120408801745		2°0'58.99"S - 128°16'53.77" E	708 Ha
13	19 Juni 2024	Mangrove Dewa Cafe and Resto	-		3°65'72.23"S - 128°21'43.40" E	0.046 Ha

6. Unit Usaha Perikanan yang diawasi dari Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak.

Pada tahun 2024 target pengawasan unit usaha perikanan yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak adalah sebanyak 30 pelaku usaha. Destructive fishing adalah kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat/bahan yang merusak (bom ikan/racun ikan/setrum ikan). Kegiatan pengawasan ditargetkan pada Kapal perikanan dibawah 10 GT yang diperiksa dan tidak membawa alat/bahan dan/atau hasil tangkapan yang berasosiasi dengan destructive fishing (DF). Parameter verifikasi: Tidak menggunakan dan/atau memiliki bom ikan/racun ikan dan setrum ikan. Pada triwulan II tahun 2024 telah dilakukan pengawasan unit usaha perikanan yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak sebanyak 17 pelaku usaha. Adapun hasil pengawasan sebagai berikut :

Tabel 3.17 Pengawasan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak.

No	Tanggal Pelaksanaan	Penanggung Jawab Kapal/Pemilik	GT	Alat Tangkap	Lokasi Penangkapan
1	02 - 03 Mei 2024	Bapak Amir	3 GT	Pancing Tonda	0°55'41.3" N - 127°29'03.1" E
2		Bapak Yunus	3 GT	Hand Line	0°53'57.5" N - 127°29'18.2" E
3		Bapak Abdulah	3 GT	Pancing Dasar	0°55'04.0" N - 127°29'16.1" E
4		Bapak Ali	2 GT	Hand Line	0°57'41.5" N - 127°30'13.5" E
5	19 Februari 2024	Bpk.Edy	1 GT	Hand Line	1°56.590' N - 127°28.099' E
6		Bpk.Man	1 GT	Hand Line	1°56'32.14 N - 127°29'719" E
7		Bpk. Nurdin	3 GT	Hand Line	1°56'32.20" N - 127°29'900" E
8	21 - 23 Maret 2024	Bpk. Pole	<5GT	Pancing Ulur	-2°803.384' S - 129°057.563' E
9		Bpk. La Sesa	<5GT	Pancing Ulur	-2°803.384' S - 129°057.563' E
10		Bpk. La Leke	<5GT	Pancing Ulur	-2°803.384' S - 129°057.563' E
11		Bpk. Yohan	<5GT	Pancing Ulur	-2°803.384' S - 129°057.563' E
12		Bpk. Yopi Watloli	<5GT	Pancing Ulur	-2°803.384' S - 129°057.563' E
13		Bpk. Tono	<5GT	Pancing Ulur	-2°803.384' S - 129°057.563' E

14		Bpk. La Arifin	<5GT	Pancing Ulur	-2°76.454' S - 129°024.498' E
15	27 Maret 2024	Ramadan Awal	1 GT	Pancing Tonda	-4.530124° S - 129.906168° E
16		Aliba	1 GT	Pancing Tonda	-4.53043° S - 129.9065° E
17		Suliwa	1 GT	Pancing Tonda	-4.53019° S - 129.906287° E

- **Sasaran Kegiatan 4 “Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya perikanan”**

Pencapaian Sasaran Kegiatan 4 yaitu “Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya perikanan” diuraikan dalam 1 IKU yaitu (1) “Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan dan pemanfaatan sumber daya perikanan”.

6. IKU 4.1 “Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan dan pemanfaatan sumber daya perikanan”

Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan dan pemanfaatan sumber daya perikanan adalah nilai tahapan pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha dengan jumlah pelaku usaha perikanan yang diriksa. Pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan adalah upaya untuk memastikan tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan yang dilakukan melalui tahapan pemeriksaan meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan.

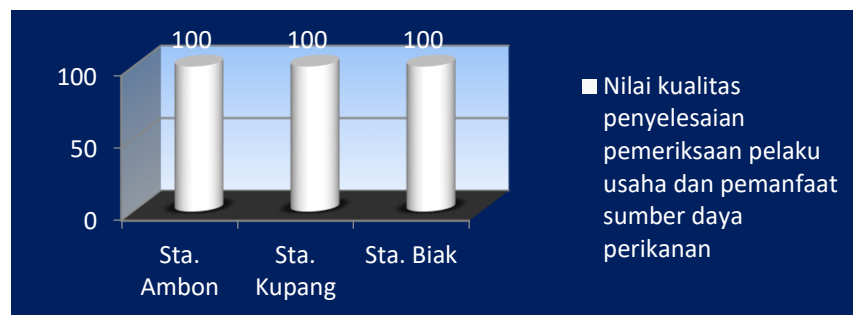
Pelaku usaha perikanan adalah unit/proyek usaha orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang perikanan mencakup subsektor penangkapan ikan, pengangkutan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan ikan dan pemasaran ikan. Pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan terdiri atas pengawasan rutin berbasis OSS dan pengawasan lainnya (pengawasan penangkapan ikan terukur, importasi hasil perikanan, kegiatan budidaya ikan prioritas Menteri, pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan, dan/atau tindak lanjut aduan masyarakat) yang dilaksanakan secara rutin maupun insidentil.

Pada triwulan II tahun 2024 capaian kinerja IKU 6 “Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan” yakni 100 dari yang ditargetkan 100 atau 100% (tabel 3.13)

Tabel 3.18 capaian kinerja IKU 4.1 “Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya perikanan”

Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Perhitungan	Target	Target	Capaian	%
			2024	JUNI	JUNI	
Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya perikanan					100	
Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (Nilai)	Nilai	Rata-rata	100	100	100	100

Berdasarkan data capaian diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja “Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan” jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dapat diketahui bahwa Stasiun PSDKP dapat mempertahankan capaian dan menjadi tolak ukur tercapainya IKU ini dalam target jangka menengah. IKU ini juga merupakan salah satu IKU yang diterapkan pada seluruh UPT lingkup Ditjen PSDKP. Adapun nilai capaian UPT lainnya (Kupang dan Biak) dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan hal ini dapat dilihat pada Gambar 7.



Gambar 9. Capaian kinerja persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan

Seluruh pencapaian kegiatan yang dilakukan pada IKU ini tidak terlepas dari peran serta Pengawas Perikanan Stasiun PSDKP Ambon dalam melakukan kegiatan pengawasan dengan tujuan menertibkan peraturan perundang-undangan bagi para pelaku usaha yang bergerak dibidang perikanan dalam hal ini memberikan dampak langsung terhadap sumber daya perikanan.

Ukuran keberhasilan IKU ini diperoleh dari pencapaian beberapa kegiatan pengawasan yakni :

1. Pengawasan rutin berbasis OSS;
2. Pengawasan penangkapan ikan terukur;

3. Pengawasan kegiatan budidaya ikan program prioritas nasional;
4. Pengawasan pengelolaan komoditas lobster, kepiting, rajungan; dan
5. Pengawasan incidental.

Pada Triwulan II telah dilakukan kegiatan pengawasan berbasis resiko berdasarkan PERDIRJEN PSDKP Nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengawasan usaha produk pada penyelenggara perizinan berusaha berbasis resiko bidang perikanan. Adapun uraian hasil kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas perikanan Stasiun PSDKP Ambon sebagai berikut :

❖ Pengawasan Budidaya

Pada Triwulan II tahun 2024 telah dilakukan pengawasan budidaya ikan sesuai PERDIRJEN PSDKP Nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengawasan usaha produk pada penyelenggara perizinan berusaha berbasis resiko bidang perikanan terhadap 31 pelaku usaha yaitu Pokdakan Sumber Tirta Kencana dan Perorangan dengan KBLI bidang Pembesaran Tumbuhan Air Laut dan Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam.

Tabel 3.19 Hasil Pengawasan Budidaya

No	Tanggal Pemeriksaan	Nama Perusahaan	NIB	Nomor Kode Proyek	Titik Koordinat Lokasi Usaha	Status Penanaman Modal	Risiko	Nama KBLI	Skala Usaha
1	25 - 26 Maret 2024	Pokdakan Sumber Tirta Kencana	-	-	-02°96,2'42,6"LS - 129° 92,3'87;8"BT	PMDN	-	-	-
2	02-03 Mei 2024	-	-	-	2.127053 LU 128.2008 BT	PMDN	-	Pembesaran Tumbuhan Air Laut	-
3	02-03 Mei 2024	-	-	-	2.127053 LU 128.2008 BT	PMDN	-	Pembesaran Tumbuhan Air Laut	-
4	02-03 Mei 2024	-	-	-	2.127053 LU 128.2008 BT	PMDN	-	Pembesaran Tumbuhan Air Laut	-
5	02-03 Mei 2024	-	-	-	2.127053 LU 128.2008 BT	PMDN	-	Pembesaran Tumbuhan Air Laut	-
6	02-03 Mei 2024	-	-	-	2.127053 LU 128.2008 BT	PMDN	-	Pembesaran Tumbuhan Air Laut	-
7	02-03 Mei 2024	-	-	-	2.127053 LU 128.2008 BT	PMDN	-	Pembesaran Tumbuhan Air Laut	-
8	02-03 Mei 2024	-	-	-	2.127053 LU 128.2008 BT	PMDN	-	Pembesaran Tumbuhan Air Laut	-
9	02-03 Mei 2024	-	-	-	2.127053 LU 128.2008 BT	PMDN	-	Pembesaran Tumbuhan Air Laut	-

10	02-03 Mei 2024	-	-	-	2.127053 LU 128.2008 BT	PMDN	-	Pembesaran Tumbuhan Air Laut	-
11	02-03 Mei 2024	-	-	-	2.127053 LU 128.2008 BT	PMDN	-	Pembesaran Tumbuhan Air Laut	-
12	02-03 Mei 2024	-	-	-	2.127053 LU 128.2008 BT	PMDN	-	Pembesaran Tumbuhan Air Laut	-
13	02-03 Mei 2024	-	-	-	2.127053 LU 128.2008 BT	PMDN	-	Pembesaran Tumbuhan Air Laut	-
14	02-03 Mei 2024	-	-	-	2.127053 LU 128.2008 BT	PMDN	-	Pembesaran Tumbuhan Air Laut	-
15	02-03 Mei 2024	-	-	-	2.127053 LU 128.2008 BT	PMDN	-	Pembesaran Tumbuhan Air Laut	-
16	02-03 Mei 2024	-	-	-	2.127053 LU 128.2008 BT	PMDN	-	Pembesaran Tumbuhan Air Laut	-
17	23 Mei 2024	-	-	-	-20046033477429300 LS 125.97481761139443 BT	PMDN	-	-Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Laut	-
18	23 Mei 2024	-	-	-	-2.003579241109132 LS 125.9755225206374 BT	PMDN	-	-Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Laut	-
19	23 Mei 2024	-	-	-	-2.003579241109132 LS 125.9755225206374 BT	PMDN	-	-Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Laut	-
20	23 Mei 2024	-	-	-	-2.0046033477429344 LS 125.97481761139443 BT	PMDN	-	-Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Laut	-
21	23 Mei 2024	-	-	-	-2.005631573630076 LS 125.97352611803285 BT	PMDN	-	-Pembesaran Tumbuhan Air Laut	-
22	23 Mei 2024	-	-	-	-2.005631573630076 LS 125.97352611803285 BT	PMDN	-	-Pembesaran Tumbuhan Air Laut	-
23	28 Mei 2024	-	-	-	-1,05611 LS 128.1331 BT	PMDN	-	-Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam	-
24	28 Mei 2024	-	-	-	-1,065 LS 128.1319 BT	PMDN	-	-Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam	-
25	28 Mei 2024	-	-	-	-1,08333 LS 128.125 BT	PMDN	-	-Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam	-
26	28 Mei 2024	-	-	-	-1,06722 LS 128.1442 BT	PMDN	-	-Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam	-
27	28 Mei 2024	-	-	-	-1,08361 LS 128.1444 BT	PMDN	-	-Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam	-
28	28 Mei 2024	-	-	-	-1,08333LS 128.1444 BT	PMDN	-	-Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam	-

29	28 Mei 2024	-	1805240051339	202405-1823-0139-9912-788	-1,05889LS 128.1461 BT	PMDN	-	-Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam	-
30	28 Mei 2024	-	1805240051339	202405-1823-0139-9912-788	-1,0525LS 128.1461 BT	PMDN	-	-Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam	-
31	28 Mei 2024	-	1805240051339	202405-1823-0139-9912-788	-1,08333LS 128.1506 BT	PMDN	-	-Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam	-

❖ Pengawasan Unit Pengolahan Ikan

Pada Triwulan II tahun 2024 telah dilakukan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko pada subsektor pengolahan dan pemasaran ikan sesuai PERDIRJEN PSDKP Nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengawasan usaha produk pada penyelenggara perizinan berusaha berbasis resiko bidang perikanan pada 1 Pelaku Usaha yaitu PT Sanana Pelangi Indonesia dengan 3 KBLI yaitu KBLI Industri Pendinginan, KBLI Industri Pembekuan Ikan dan Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan.

Tabel 3.20 Hasil Pengawasan Unit Pengolahan Ikan

No	Tanggal Pemeriksaan	Nama Perusahaan	NIB	Nomor Kode Proyek	Titik Koordinat Lokasi Usaha	Status Penanaman Modal	Risiko	Kode KBLI	Skala Usaha
1	22 Mei 2024	PT. Sanana Pelangi Indonesia	8120003732835	202101-2620-2253-7331-954	2.0153611111111111 LS, 125.97827777777778 BT	PMA	Menengah Tinggi	KBLI 10217 - Industri Pendinginan/Pengasan Ikan	Usaha Besar
2	22 Mei 2024	PT. Sanana Pelangi Indonesia	8120003732835	202201-2415-5355-8585-560	2.0153611111111111 LS, 125.97827777777778 BT	PMA	Menengah Tinggi	KBLI 10213 — Industri Pembekuan Ikan	Usaha Besar
3	22 Mei 2024	PT. Sanana Pelangi Indonesia	8120003732835	201912-2322-0617-8977-365	2.0153611111111111 LS, 125.97827777777778 BT	PMA	Menengah Tinggi	KBLI 10219 — Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan	Usaha Besar

❖ Pengawasan Kapal Perikanan

Pada Triwulan II tahun 2024 telah dilakukan pemeriksaan kapal perikanan sesuai PERDIRJEN PSDKP Nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengawasan usaha produk pada penyelenggara perizinan berusaha berbasis resiko

bidang perikanan terhadap 17 pelaku usaha (Kapal Penangkap). Adapun hasil pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.21 Hasil Pengawasan Kapal Perikanan

NO	Tanggal Pemeriksaan	Nama Pelaku Usaha	Nama Kapal	Nama Perusahaan	Nomor Induk Berusaha	Titik Koordinat	KBLI	Skala Usaha
KAPAL PENANGKAP								
1	26 Maret 2024	Hermanto	KM. Inka Mina - 286	Koperasi Perikanan Santo Alvin Pratama	8120008931009	00°46'5,856"LU - 127°22'38,85"BT	03111 - Penangkapan Pisces/Ikan bersirip di Laut	Besar
2	26 Maret 2024	Hermanto	KM. Nelayan 2017 986	Koperasi Perikanan Santo Alvin Pratama	8120008931009	00°46'5,856"LU - 127°22'38,85"BT	03111 - Penangkapan Pisces/Ikan bersirip di Laut	Besar
3	28 Maret 2024	Irfan Abd. Rahman	KM. Inka Mina - 988	Koperasi Jasa Perikanan Setia Satu Hati	1409210069812	00°48'51,28"LU - 127°23'20,031"BT	03111 - Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Laut	Usaha Besar
4	28 Maret 2024	Zubair M. Said	KM. Putra Putri 02	Zubair M. Said	1259000131739	00°48'12,610"LU - 127°23'13,427"BT	03111 - Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Laut	Usaha Besar
5	28 Maret 2024	Zubair M. Said	KM. Putra Putri Prataya	Zubair M. Said	1259000131739	00°48'12,610"LU - 127°23'13,427"BT	03111 - Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Laut	Usaha Besar
6	28 Maret 2024	Zubair M. Said	KM. Putra Putri 01	Zubair M. Said	1259000131739	00°48'12,610"LU - 127°23'13,427"BT	03111 - Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Laut	Usaha Besar
7	28 Maret 2024	Zubair M. Said	KM. Putra Putri III	Zubair M. Said	1259000131739	00°48'12,610"LU - 127°23'13,427"BT	03111 - Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Laut	Usaha Besar
8	27 Maret 2024	Siswanto	-	PT. Bahana Maluku	1279000231193	-3°38'31,956"LS - 128°16'1,920"BT	03122 - Penangkapan Crustacea Di Perairan Darat	Usaha Besar
9	27 Maret 2024	Ahmad Bahtiar	KM. Inka Mina - 984	KUB. Putra Sibela	1312210028287	-0°37'31,674"S - 127°28'30,058"E	03111 - Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Laut	Usaha Kecil
10	27 Maret 2024	Rusdi M. Akil	KM. Inka Mina - 281	KUB. Tri Asturi	301220021173	-0°39'4,199"S - 127°28'46,982"E	03111 - Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Laut	Usaha Kecil
11	02 Mei 2024	KUB. Saputri (Muhammad Konoras)	KM. Inka Mina - 986	KUB. Saputri	0701220019774	0°37'25" LS - 127°23'49"BT	03111 - Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Laut	Usaha Menengah

12	02 Mei 2024	KUB. Anugrah Guraping (Firdaus Hamzah)	KM. Mina Maritim - 144	KUB. Anugrah Guraping	1008210012978	0.735 LS - 127.385 BT	03111 - Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Laut	Usaha Besar
13	02 Mei 2024	KUB. Kie Matubu (Abubakar Fara)	KM. Inka Mina - 989	KUB. Kie Matubu	1211000501274	0.6227777777777778 LS - 127.40555555555557 BT	03111 - Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Laut	Usaha Menengah
14	03 Mei 2024	KUB. Sinar Tomalou (Irwan Suleman)	KM. Inka Mina - 993	KUB. Sinar Tomalou	1226000612783	0.685 LS - 127.45555555555556 BT	03111 - Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Laut	Usaha Menengah
15	03 Mei 2024	KUB. Sonyinga (Musa Amir)	KM. Inka Mina - 275	KUB. Sonyinga	1259000322023	0.6227777777777778 LS - 127.40555555555557 BT	03111 - Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Laut	Usaha Kecil
16	02 Mei 2024	Junaidi Lestaluhi	KM. Lai - Lai 02	Junaidi Lestaluhi	1101220046396	2.970478° LS - 128.115497°BT	03111 - Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Laut	Usaha Kecil
17	02 Mei 2024	Koperasi Kemaritiman Taman Siswa (M.Fauzi Muslim)	KM. Tuna Morotai	Koperasi Kemaritiman Taman Siswa	1298000322454	2°22'54.1" N - 128°39'50.3"E	03111 - Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Laut	Usaha Kecil

• **Sasaran Kegiatan 6 “Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas”**

Pencapaian Sasaran Kegiatan 6 yaitu “Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang tuntas” diuraikan dalam 2 IKU yaitu (1) “Indeks Pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan” dan (2) Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan.

7. IKU 6.1 “Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan”

Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (KP) merupakan pengukuran kinerja atas pelaksanaan pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan pertama kali oleh pejabat berwenang, pada:

- UPT PSDKP untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-1 (SP1)/Paksaan Pemerintah;
- UPT PSDKP untuk pengenaan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut,

importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah.

Tabel 3.22. Capaian kinerja IKU 6.1 “Persentase pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan”

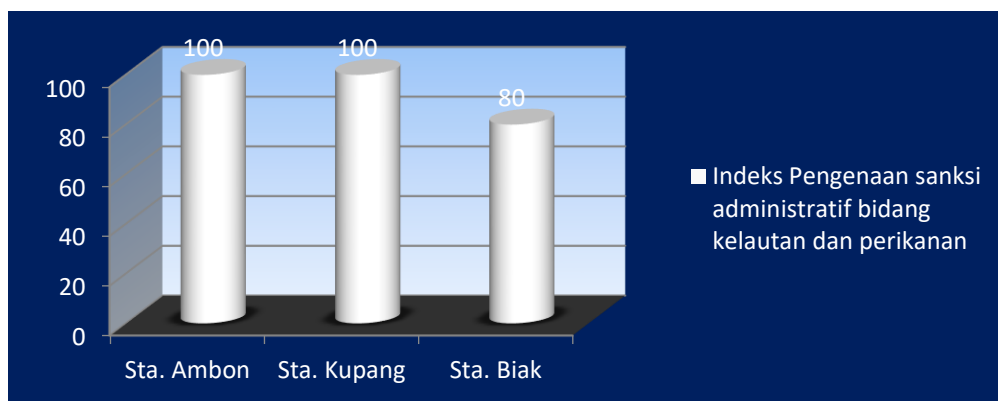
Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Perhitungan	Target	Target	Capaian	%
			2024	JUNI	JUNI	
Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas					120	
Indeks Pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)	Indeks	Nilai Posisi Akhir	80	60	100	120

Pada Triwulan II Tahun 2024 capaian IKU 6.1 “Persentase pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan” tercapai sebesar 100%. Nilai ini baru tercapai di Triwulan II Tahun 2024 sehingga dapat menjadi tolak ukur untuk pencapaian target jangka menengah untuk mencapai target yang lebih baik lagi kedepan.

Tabel 3.23. Perhitungan Indeks kinerja pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan”

No.	Pelaku Usaha	Pelanggaran	Proses Penanganan			
		Rincian Pelanggaran	Jenis Sanksi Administratif (SP1, SP2, Paksaan Pemerintah, Denda Administratif, dan/atau Rekomendasi Pembekuan/Pencabutan Izin)	Jumlah Denda Administratif (Rp)	Kode Billing	Tanggal Penyetoran
1	KM. INKA MINA 23	Pelanggaran Terhadap Tidak Memiliki Perizinan Berusaha	1. SP-1			
2	KM. INKA MINA 540	Pelanggaran Terhadap Tidak Memenuhi Perizinan Berusaha	1. SP-1			
3	PT BARTRA PUTRA MULIA	Pelanggaran Tidak Memiliki Dokumen PKKPR dan Ijin Reklamasi	1. Paksaan Pemerintah 2. Denda Administratif	13.766.400	82024100000000	3 Mei 2024

Pada Triwulan II tahun 2024 telah dilakukan penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan terhadap 3 Pelaku usaha antara lain 2 Pelaku usaha bidang perikanan yaitu KM. Inka Mina 23 dan KM Inka Mina 540 yang dikenakan S-P1 dan 1 pelaku usaha bidang kelautan yaitu PT Bartra Putra Mulia yang dikenakan sanksi administratif sebesar Rp.13.766.400 .



Gambar 10. Capaian kinerja “pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan”

IKU “Persentase Pengenaan Sanksi Administratif bidang kelautan dan perikanan” ini juga merupakan IKU yang ditargetkan pada seluruh UPT DITJEN PSDKP. Berdasarkan hasil capaian dapat dilihat bahwa nilai capaian Stasiun PSDKP Ambon sama dengan capaian UPT PSDKP lainnya atau sebesar 100%.

8. IKU 6.2 “Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan”

Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Kapal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan kinerja pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang/pelaku usaha yang berdasarkan hasil analisis sistem pemantauan kapal terdapat dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Pemeriksaan dilaksanakan oleh: a). Kepala UPT PSDKP dimana pelaku usaha berdomisili; b). Kepala UPT PSDKP dimana kegiatan berusaha dilaksanakan atau dimana Kapal perikanan berpangkalan; atau; c). Ditjen PSDKP Pusat (Dit PP) dalam hal pemeriksaan tidak memungkinkan dilaksanakan oleh Kepala UPT PSDKP sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, atau apabila pelanggaran melibatkan pelaku usaha skala besar/ menjadi perhatian publik.

Tabel 3.24. Capaian kinerja IKU 6.2 “Persentase pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan”

Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Perhitungan	Target 2024	Target JUNI	Capaian JUNI	%
Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	Indeks	Nilai Posisi Akhir	80	50	80	120

Pada Triwulan II Tahun 2024 capaian IKU “presentase pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan” tercapai 80 atau sebesar 120%. Tidak terjadi pelanggaran pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan pada Triwulan II sehingga mempertimbangkan bahwa pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan bersifat kasuistis dan sangat dipengaruhi oleh eksternal apabila tidak terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha/pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, maka target pengenaan sanksi administratif dianggap tercapai. Nilai Capaian 100% masuk dalam kriteria nilai indeks 80.

Tabel 3.25. Perhitungan Indeks kinerja pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan”

NO	UPT	HASIL ANALISIS PUSDAL (INDIKASI PELANGGARAN)								ANALISIS LANJUTAN		TINDAK LANJUT							CAPAIAN IKU	
		TRANSHIP MENT	PELABUHAN PANGKALAN	DPI	JALUR (<12 NM)	IZIN HABIS			JUMLAH	DALAM PROSES	SUDAH	PROSES BAP / SURAT PEMANGGILAN	BUKAN PELANGGARAN	SP1	SP2	DENDA	PIDANA	%	Kriteria Indeks	
						<30 hari	>30 hari	Total												
1	AMBON	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	100		
		-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	100		
		-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	100		
	TOTAL	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	100,00%		

$$X = \frac{A}{B} \times 100 \% \square$$

X : IKU UPT
A : Jumlah orang/pelaku usaha yang sudah selesai diperiksa
B : Jumlah laporan hasil analisis pemantauan kapal pelaku usaha KP yang dilaporkan oleh pUSDal (indikasi pelanggaran)

$$X = \frac{3}{3} \times 100 \%$$

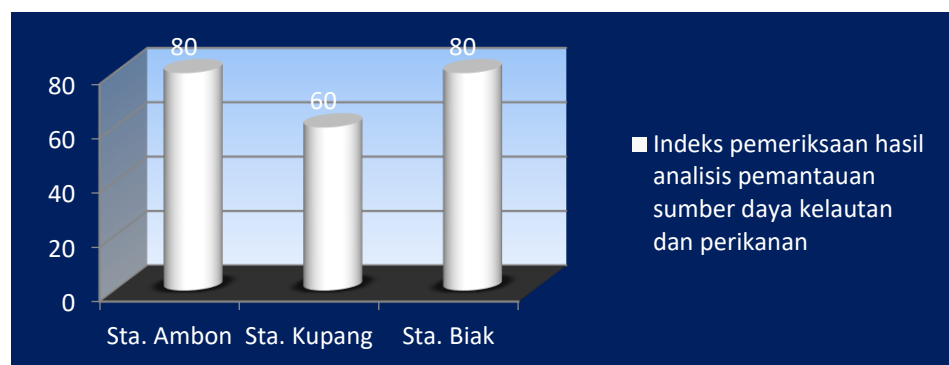
$$X = 100 \%$$

Nilai capaian 100% masuk dalam kriteria nilai indeks 80

KRITERIA INDEKS

PERSENTASE	NILAI INDEKS MAKS	KRITERIA
>50%	40	Kurang
50% - 75%	70	Cukup
75% - 100%	80	Baik
>100%	100	Sangat

Mempertimbangkan bahwa pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan bersifat kasuistis dan sangat dipengaruhi oleh eksternal, apabila tidak terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha/pemanfaat sumber daya kelautan dan perikanan, maka target pengenaan sanksi administratif dianggap tercapai



Gambar 3.11. Capaian kinerja “pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan”

IKU “pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan” ini juga merupakan IKU yang ditargetkan pada seluruh UPT DITJEN PSDKP. Berdasarkan hasil capaian dapat dilihat bahwa nilai capaian Stasiun PSDKP Ambon

sebesar 80 sama dengan capaian UPT PSDKP Biak dan UPT Stasiun PSDKP Kupang dengan nilai capaian sebesar 60.

• **Sasaran Kegiatan 8 “Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP”**

Pencapaian sasaran kegiatan 8 yaitu “Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP” diuraikan dalam 14

Indikator Kinerja (IK). Adapun penjabaran IK sebagai berikut :

9. IKM 8.2 “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)”

Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin. Capaian IK 8.2 “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)” pada Triwulan II tahun 2024 yakni 100 atau 100% dari target yang ditetapkan yakni 100 (tabel 3.16).

Tabel 3.26 “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)”

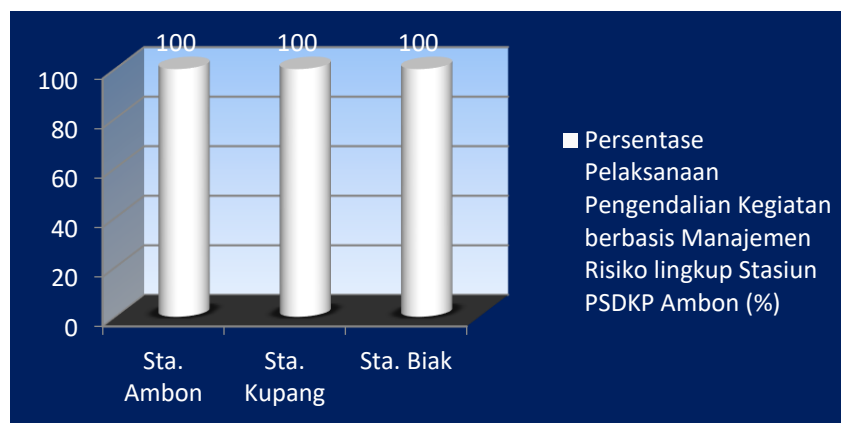
Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Perhitungan	Target	Target	Capaian	%
			2024	JUNI	JUNI	
Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)	%	Nilai Posisi Akhir	100	100	100	100

Dapat dilihat bahwa nilai capaian Triwulan II Tahun 2024 ini dapat dipertahankan dengan tahun sebelumnya. Capaian IK ini dilakukan dalam bentuk pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar

sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.

Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.

IK ini merupakan indikator kinerja yang dilakukan perhitungan pada seluruh UPT DITJEN PSDKP. Jika disandingkan hasil capaian Stasiun PSDKP Ambon UPT lainnya maka dapat diketahui bahwa seluruh UPT dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan (Gambar 8)



Gambar 12. Capaian IK “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)”

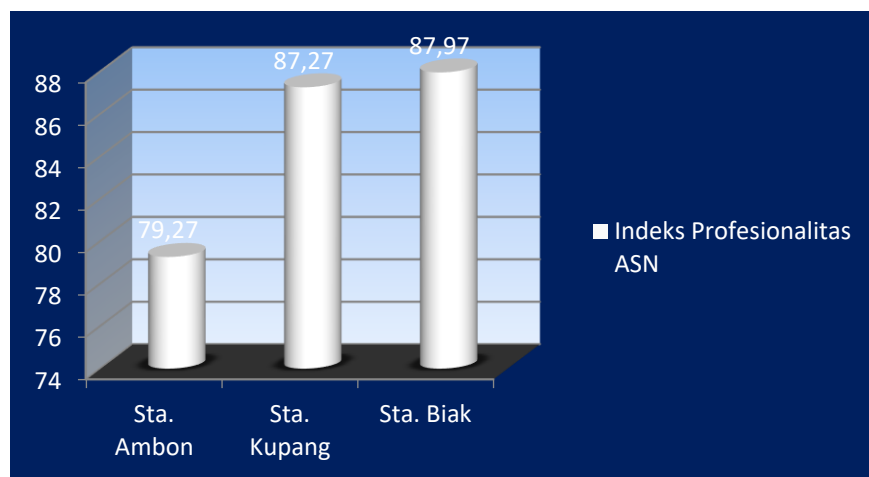
10. IKM 8.4 “Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Ambon”

Profesionalitas ASN diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, Profesionalitas ASN diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin per masing-masing Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Kualifikasi [Bobot 25%] yaitu yang berkenaan dengan tingkat pendidikan ASN sesuai SK Pangkat terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di-update pada aplikasi SIMPEG Online KKP selain itu juga berkaitan dengan Jumlah sertifikat Diklat/Seminar/Workshop/Seminasi yang diikuti pegawai dan telah di-input pada aplikasi E-Pegawai KKP.

Tabel 3.27 “Capaian IKM 8.4. Persentase Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)”

Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Perhitungan	Target 2024	Target JUNI	Capaian JUNI	%
Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Ambon	indeks	Nilai Posisi Akhir	82	77	79,27	103

Pada tahun 2024 capaian IKM 8.4 “Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Ambon” sebesar 79,27 atau 102,95% dari target yang ditetapkan yakni 82 (Tabel 3.37). Pengukuran capaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Ambon menggunakan 4 variabel, yaitu : Kualifikasi (21,07%), Kompetensi (40%), Kinerja (25%) dan Disiplin (5%). Berdasarkan nilai capaian tersebut jika disandingkan dengan capaian Tahun 2023 maka, capaian IKM ini mengalami penurunan dibanding Tahun 2023 sehingga menjadi acuan untuk meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN pada Triwulan berikutnya.



Gambar 13. Capaian IK “Pelaksanaan Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Ambon lingkup UPT DITJEN PSDKP”

Jika disandingkan hasil capaian Stasiun PSDKP Ambon UPT Eselon IV lingkup DITJEN PSDKP maka dapat diketahui bahwa UPT PSDKP lainnya (Kupang dan Biak) dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu berkisar 87 %.(Gambar 3.15)

11. IK. 8.6 “Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Ambon yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan”

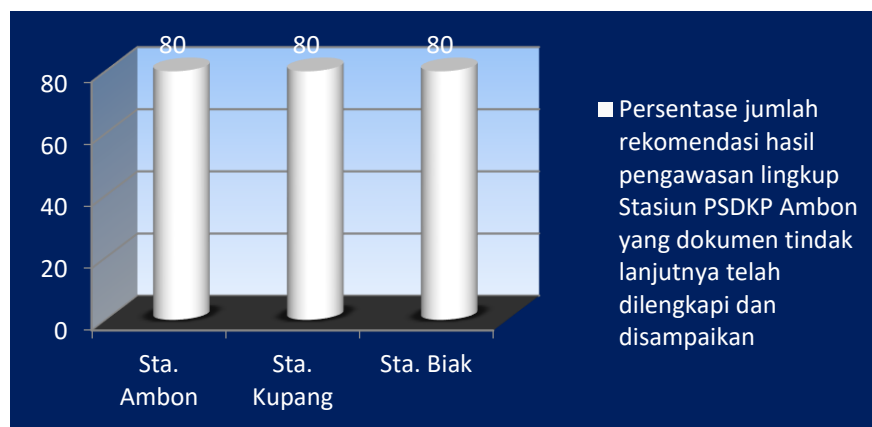
Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Ambon yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan merupakan

Jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP, tidak ada sisa rekomendasi temuan Stasiun PSDKP Ambon, sehingga berdasarkan dokumen informasi indikator kinerja, capaian yang didapat setara dengan target yang telah ditetapkan.

Tabel. 3.28 Capaian IK 8.6“ Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Ambon yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan”

Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Perhitungan	Target	Target	Capaian	%
			2024	JUNI	JUNI	
Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Ambon yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	%	Nilai Posisi Akhir	80	80	80	100

Pada Triwulan II Tahun 2024 capaian IKM 8.6 “Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Ambon yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan” sebesar 80 atau 100% sama dengan target yang ditetapkan yakni 80 (Tabel 3.37).



Gambar 14. Capaian IK “Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Ambon yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan”

IK ini merupakan indikator kinerja yang tetapkan terhadap seluruh UPT Direktorat Jenderal PSDKP, berdasarkan perbandingan dengan beberapa UPT lainnya, dapat dilihat bahwa, capaian IKM Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan memiliki nilai yang setara dengan UPT Lainnya lingkup DITJEN PSDKP (Gambar 9).

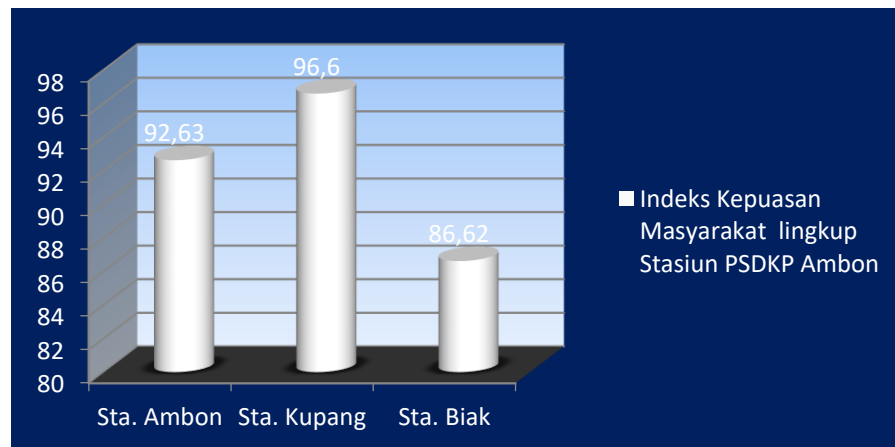
12. IK 8.9 “Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Ambon

Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Stasiun PSDKP Ambon adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Stasiun PSDKP Ambon. Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Stasiun PSDKP Ambon, yaitu Penerbitan Standar Laik Operasi (SLO) dengan nilai capaian 92,63.

Tabel. 3.29 Capaian IK 8.9 “Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Ambon”

Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Perhitungan	Target 2024	Target JUNI	Capaian JUNI	%
Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik lingkup Stasiun PSDKP Ambon	Indeks	Nilai Posisi Akhir	80	80	92,63	115,8

IK ini merupakan indikator kinerja yang ditetapkan terhadap UPT Direktorat Jenderal PSDKP, berdasarkan perbandingan dengan beberapa UPT lainnya, dapat dilihat bahwa, capaian IK Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna Layanan Publik ketiga UPT DITJEN PSDKP yang tertinggi ada pada Stasiun PSDKP Kupang dan terendah ada pada Stasiun PSDKP Biak (Gambar 10).



Gambar 15. Capaian IK “ Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Ambon”

13. IK 8.10 “Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Ambon”

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah maupun swasta untuk

mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Terdapat 3 Komponen yang dijadikan sebagai tolak ukur, yaitu:

- Dokumen: Renstra 2020-2024, Perjanjian Kinerja, Informasi Indikator Kinerja, Laporan Kinerja & Interim, Rencana Kerja RB, Renaksi Kinerja;
- Keikutsertaan: Pimpinan Unit Eselon I-IV, Staf (minimal 2 orang per Unit Eselon IV;
- Keaktifan: Pimpinan Unit Eselon I-Staf

Tabel 3.30. Capaian IK 8.10 “Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Ambon”

Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Perhitungan	Target	Target	Capaian	%
			2024	JUNI	JUNI	
Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Ambon	%	Nilai Posisi Akhir	94	94	125	120

Pada triwulan II Tahun 2024 ini capaian IKM 8.10 “Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Ambon” tercapai melebihi dengan target yang ditetapkan dengan nilai capaian 125 dari target yang ditetapkan 94. Hal ini mengacu pada bitrix pegawai yang mempengaruhi maksimalnya nilai perhitungan.

IKM ini merupakan indikator kinerja manajerial yang ditargetkan kepada seluruh UPT lingkup DITJEN PSDKP. Berdasarkan hasil perhitungan dapat dilihat bahwa nilai capaian Stasiun PSDKP Ambon yaitu 125 sehingga hal ini menjadi catatan untuk Triwulan II akan ditingkatkan (Gambar 11).



Gambar 16. Capaian Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup UPT DITJEN PSDKP

14.IK 8.13 “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Ambon”

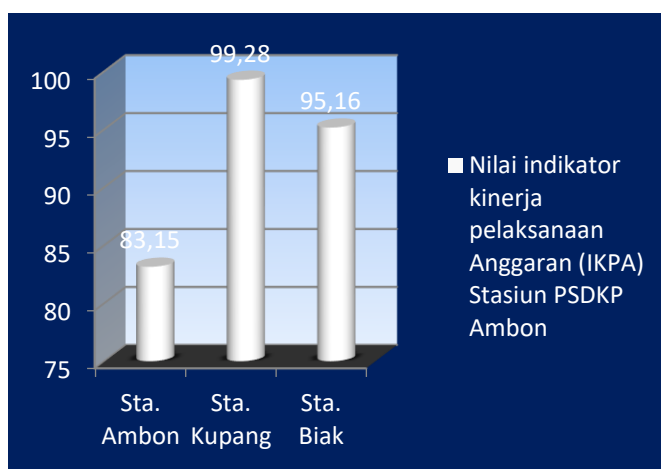
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Target IKPA Tahun 2023 sebesar 89.00 (nilai). Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain :

- Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
- Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau
- Kurang, apabila nilai IKPA < 70

Tabel 3.31 “Presentase Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Ambon”

Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Perhitungan	Target	Target	Capaian	%
			2024	JUNI	JUNI	
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Ambon	%	Nilai Posisi Akhir	93,76	82	83,15	101,4

Pada Triwulan II Tahun 2024 capaian IK 8.13 “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Ambon” sebesar 83,15 atau 101,40% dari target yang ditetapkan yakni 82.00 (Tabel 3.45).



Gambar 17. Capaian IK. “Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT DITJEN PSDKP”

Jika dibandingkan hasil capaian Stasiun PSDKP Ambon UPT Eselon IV lingkup DITJEN PSDKP maka dapat diketahui bahwa seluruh UPT dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan, dengan indeks capaian tertinggi ada pada Stasiun PSDKP Kupang 99.28 %

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Realisasi anggaran hingga Triwulan II Tahun 2024 yang telah dicapai oleh Stasiun Pengawasan SDKP Ambon sebesar Rp. 21.223.634.836 (*Dua Puluh Satu Miliar Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*) atau 67,37% dari total yang dianggarkan Rp. 31.503.091.000,- (*Tiga Puluh Satu miliar lima ratus tiga juta sembilan puluh satu ribu rupiah*). Rincian penyerapan anggaran per kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.32. Rincian Penyerapan Anggaran per Kegiatan Stasiun Pengawasan SDKP Ambon hingga Triwulan II Tahun 2024

Kode	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2350	Pemantauan dan Operasi Armada Infrastruktur Pengawasan	17,286,819,000	14,181,884,797	73,78
2351	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	284.500.000	18,921,636	13,74
2352	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	931.500.000	529,531,867	56,85
2353	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	720.000.000	234,268,747	32,54
2355	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PSDKP	12.280.272,000	7,041,750,039	57,34
Total		31,503,091,000	21,223,634,836	67,37

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil capaian kinerja sasaran PSDKP Ambon yang tertuang dalam perjanjian kinerja, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Hasil capaian kinerja sasaran PSDKP Ambon yang tertuang dalam perjanjian kinerja Triwulan II Tahun 2024 didukung dengan tersedianya data dan informasi bidang pengawasan sumber daya kelautan yang diperlukan sebagai *base line* pengawasan serta digunakan data dukung capaian;
2. Nilai Capaian kinerja Stasiun PSDKP Ambon pada Triwulan II Tahun 2024 Sebesar 108,67%, dengan kategori hijau. Hal ini didukung dengan tercapainya IKU dan IK Stasiun PSDKP Ambon; dan
3. Nilai capaian anggaran Stasiun PSDKP Ambon tahun 2024 dalam mendukung tercapainya kegiatan Indikator Kinerja Stasiun PSDKP Ambon sampai pada Triwulan II tahun 2024 Rp. 21.223.634.836 (*Dua Puluh Satu Miliar Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*) atau 67,37% dari total yang dianggarkan Rp. 31.503.091.000,- (*Tiga Puluh Satu miliar lima ratus tiga juta sembilan puluh satu ribu rupiah*).

B. Saran

Berdasarkan hasil capaian Stasiun PSDKP Ambon Triwulan II tahun 2024 telah tercapai dengan kategori hijau, namun ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan lagi di tahun 2024 yakni :

1. Pengawasan Sumber daya kelautan dan perikanan ditingkatkan pada Triwulan II; dan
2. Melakukan penertiban terhadap pelaku usaha perikanan yang melakukan aktifitas di kawasan konservasi yang belum memiliki dokumen perizinan.

C. Rekomendasi

Melakukan sinergi bersama instansi terkait dalam penerbitan ijin TDKP bagi nelayan yang berada di kawasan konservasi nasional TWP Laut Banda.